

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5
TAHUN 2014 DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIAH
DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

DHEA AMELIA RANGKUTI

NPM : 1603 1 000 72

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : DHEA AMELIA RANGKUTI
NPM : 1603100072
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Dalam Rangka Pelaksanaan Pendidikan Diniyah Takmilyah di Kota Medan

Medan, 08 Juni 2021

PEMBIMBING


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

DISETUJUI OLEH
KETUA JURUSAN


NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd

DEKAN


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

BERITA ACARA PENGESAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : DHEA AMELIA RANGKUTI
NPM : 1603100072
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, Tanggal : Selasa, 30 Maret 2021
Waktu : 07.45 Wib s/d SELESAI

TIM PENGUJI

PENGUJI I : NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd

PENGUJI II : SYAFRUDDIN, S.Sos., MH

PENGUJI III : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

Drs. ZULFAHMI, M.LKom

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, DHEA AMELIA RANGKUTI, NPM. 1603100072, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar keserjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Juni 2021
Yang Menyatakan



DHEA AMELIA RANGKUTI
NPM. 1603100072

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur bagi ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam untuk tuntunan dan suri tauladan Rasulullah beserta keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai islam yang sampai pada saat ini dapat dinikmati oleh seluruh manusia di penjuru dunia.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh gelar sarjana (S.AP) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Publik Konsentrasi Kebijakan Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berisikan hasil penelitian yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Dalam Rangka Pelaksanaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah di Kota Medan”**

Teristimewa dan yang paling utama, Kepada Ayahanda Penulis tercinta dan Ibunda yang telah banyak memberikan motivasi, masukan, nasihat serta dukungan dan semangat dari awal sampai mendapat gelar sarjana. Semoga Ayah, Ibu saya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin ya rabbalal’alamiin.

Pada kesempatan ini saya juga dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Agussani, M.AP. selaku Rektor universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak DR. Arifin Saleh, S.sos M.sp selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Drs. Zulfahmi, M.I kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Nalil Khairiah S.I.P M.P.D selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., MSP selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga Selaku Dosen Pembimbing yang telah Meluangkan Waktu dan Memberikan Bimbingan Serta Pengarahan Kepada Penulis Selama Penulisan Skripsi.
6. Seluruh staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
7. Seluruh pegawai staff biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu dalam semua urusan penulis mulai dari perkuliahan sampai akhir pengerjaan skripsi.
8. Para Pegawai dan staff Yayasan Pendidikan Al-Khairiyah Sunggal yang telah banyak membantu penulis dalam pelaksanaan riset.
9. Para informan dalam penelitian ini, terima kasih atas partisipasinya dalam penulisan skripsi ini.

Atas segala bantuan dari berbagai pihak yang tak ternilai harganya, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya, semoga Allah SWT

melimpahkan rahmat dan karunianya serta membalas segala budi baik yang di vii berikan kepada penulis. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, Juni 2021

Penulis

DHEA AMELIA RANGKUTI

1603100072

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDIDIKAN DINIYAH
TAKMILIAH DI KOTA MEDAN**

DHEA AMELIA RANGKUTI

NPM : 1603 1 000 72

ABSTRAK

Pelaksanaan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kota Medan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan nomor 5 tahun 2014. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) di Kecamatan Medan Sunggal. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara terstruktur kepada kepala yayasan dan guru serta orang tua murid di YP. Al-Khairiyah Sunggal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan pelaksanaan Diniyah Takmiliyah di YP. Al-Khairiyah sudah berjalan efektif dan terarah. Pencapaian tujuan yang dilakukan YP. Al-Khairiyah diiringi dengan upaya-upaya yang sistematis dan terarah, seperti membuat laporan seluruh aktivitas kegiatan pendidikan Diniyah Takmiliyah secara berkala, melakukan evaluasi serta adanya tim pengawas yang selalu melakukan pemantauan. Selain itu, tindakan yang dilakukan adalah dengan membuat RPP, mewajibkan seluruh siswa untuk menghafal ayat dan surat, memberikan LKS, kegiatan ekstrakurikuler yang bernuansa islami dan umum serta adanya penentuan target pembelajaran yang harus dicapai. Guru-guru yang berkontribusi mengajar di YP. Al-Khairiyah adalah guru yang berkompeten di jurusan dan materi pelajaran dan proses pelaksanaan kegiatan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan juga sudah berjalan dengan efektif dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, dan Pendidikan Diniyah Takmiliyah.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Pembatasan Masalah.....	3
1.3. Rumusan Masalah.....	3
1.4. Tujuan Penelitian	4
1.5. Manfaat Penelitian	4
1.6. Sistematika Penulisan	4
BAB II URAIAN TEORITIS.....	6
2.1. Implementasi Kebijakan Publik.....	6
2.1.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	6
2.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik	10
2.1.3 Pengertian Kebijakan Publik.....	12
2.1.4 Teori-Teori Implementasi Kebijakan Publik	13
2.2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 di Kota Medan	17
2.3. Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliyah.....	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
3.1. Jenis Penelitian.....	21
3.2. Kerangka Konsep.....	21
3.3. Definisi Konsep	22
3.4. Kategorisasi Penelitian.....	23
3.5. Informan atau Narasumber.....	24
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.7. Teknik Analisis Data.....	25
3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian	25

3.8.1 Lokasi Penelitian.....	25
3.8.2 Waktu Penelitian.....	26
3.8.3 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
4.1. Hasil Penelitian	30
4.2. Deskripsi Hasil Wawancara.....	31
4.2.1 Adanya tujuan yang dicapai dalam melaksanakan kebijakan secara maksimal dan terarah	31
4.2.2 Adanya tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan.....	36
4.2.3 Adanya sumber daya manusia yang berkontribusi dalam menjalankan kebijakan.....	41
4.2.4 Adanya proses pelaksanaan kewajiban dalam menjalankan Kebijakan	45
4.3. Pembahasan.....	48
BAB V PENUTUP	60
5.1. Kesimpulan	60
5.2. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Madrasah Diniyah merupakan salah satu lembaga pendidikan keagamaan pada jalur luar sekolah yang secara komprehensif mampu memberikan pendidikan agama Islam kepada anak didik (yang tidak terpenuhi pada jalur sekolah) dan diberikan melalui sistem klasikal. Dibentuknya Madrasah Diniyah ini diharapkan sebagai bentuk penambahan materi belajar pendidikan Islam bagi peserta didik diluar sekolah umum. Madrasah Diniyah berbeda dengan pesantren ataupun sekolah umum. Namun Madrasah Diniyah adalah lembaga pendidikan yang memadukan sistem pesantren dan sekolah umum. Untuk menumbuh kembangkan Madrasah Diniyah sebagai satuan pendidikan yang berlandaskan islam, maka Madrasah Diniyah harus dapat memberikan bekal kemampuan dasar dan keterampilan dibidang agama islam untuk mengembangkan kehidupan peserta didik sebagai pribadi muslim, anggota masyarakat dan warga negara.

Madrasah Diniyah terbagi kedalam tiga bagian, yang pertama adalah Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya (PDTU) yang merupakan satuan pendidikan keagamaan yang sifatnya non formal dan setara dengan pendidikan tingkat dasar (SD) dengan masa belajar 4 tahun. Kemudian yang kedua adalah Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustho (PDTW) yang merupakan merupakan satuan pendidikan keagamaan yang sifatnya non formal dengan masa belajar 6 tahun. Sedangkan yang ketiga adalah Madrasah Diniyah Takmiliyah Amaliyah (PDTA),

yang merupakan merupakan satuan pendidikan keagamaan yang sifatnya non formal dengan masa belajar 3 tahun.

Pelaksanaan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kota Medan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan nomor 5 tahun 2014. Kebijakan ini menegaskan bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan pendidikan Islam khususnya bagi siswa Sekolah Dasar yang beragama Islam di Kota Medan diperlukan adanya aturan yang mengatur tentang wajib belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah, Organisasi, Lembaga Masyarakat atau Pemerintahan (Tenaga Pengajar). Selain itu, dalam kebijakan ini juga mengatur tata cara atau sistem pelaksanaan pendidikan Madrasah Diniyah, syarat menjadi peserta didik untuk menjadi siswa, sarana dan prasarana yang wajib disediakan oleh penyelenggara Madrasah Diniyah, bantuan dari Pemerintahan dan lain sebagainya.

Namun, fenomena yang terjadi terhadap perkembangan Madrasah Diniyah Takmiliyah di Indonesia masih sangat signifikan. Berdasarkan rangkuman dari *kompasiana*, secara sosial Madrasah Diniyah menghadapi masalah sosial dalam hal informasi keberadaan dan fungsinya dikalangan masyarakat. Selain itu, pada masalah ekonomi Madrasah Diniyah mengalami masalah pembiayaan dan pendanaan yang kurang baik dari Pemerintah ataupun Departemen Agama. Selain itu, gaji guru juga hanya berdasarkan uang iuran siswa yang notabennya sangat sedikit. Maka dari itu, Madrasah Diniyah sangat sulit berkembang dan keadaannya selalu statis.

Madrasah Diniyah Yayasan Pendidikan Al-Khairiyah adalah sebuah Madrasah Diniyah yang didirikan di Kecamatan Medan Sunggal. Berdasarkan

hasil pre riset yang dilakukan peneliti dengan berkunjung dan wawancara singkat pihak pengelola dari Yayasan Pendidikan Al-Khairiyah, peneliti menemukan bahwa Yayasan Pendidikan Al-Khairiyah kurang mengoptimalkan kinerja mereka. Hal ini disebabkan karena kurangnya dana bantuan dari Pemerintah, minimnya sarana dan parasarana (fasilitas) yang tersedia untuk menunjang pembelajaran siswa, kurang optimalnya sistem dan proses pembelajaran siswa, kesejahteraan guru dalam menerima gaji dan minimnya siswa yang berminat untuk mengikuti pembelajaran Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti ingin menganalisis secara spesifik bagaimana bentuk implementasi pelaksanaan pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah di Yayasan Pendidikan Al-Khairiah sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2014. Maka dari itu, peneliti menjadikan uraian ini sebagai latar belakang masalahnya dengan judul: **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Dalam Rangka Pelaksanaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah di Kota Medan”**.

1.2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan serta untuk menghindari kemungkinan yang menyimpang dari pokok permasalahan, maka penelitian ini dibatasi hanya mengenai tentang Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pendidikan madrasah diniyah Takmiliyah berdasarkan peraturan daerah nomor 5 tahun 2014.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut adalah “Bagaimana

implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang pelaksanaan pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) di Yayasan Pendidikan Al- Khairiyah Sunggal ?”

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) di Kecamatan Medan Sunggal.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ataupun menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, terutama khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU Medan, serta dapat dijadikan pedoman dalam penelitian yang lain sesuai dengan bidang penelitian yang peneliti teliti.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pemikiran positif dan membangun bagi pemecahan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian.
3. Secara Ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pemerintahan pada khususnya, serta sebagai bahan perbandingan bagi calon peneliti selanjutnya.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, akan disusun dalam lima bab. Tiap-tiap bab terdiri atas beberapa sub-sub yang sesuai keperluan kajian yang akan penulis lakukan.

BAB I: Dalam bab pendahuluan, peneliti memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Skripsi ini akan memuat gambaran umum tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah, dan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah atau yang disingkat dengan MDTA.

BAB III: Skripsi ini akan membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian diantaranya letak geografis, keadaan topografis, serta penduduk dan potensi wilayah di lokasi tersebut.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menguraikan hasil pengamatan dan penelitian dari narasumber

BAB V: Penutup

Memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran saran dari hasil penelitian

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Implementasi Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni: (1.) Tahapan pengesahan peraturan perundangan. (2.)Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.(3.)Kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan. (4.)Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.(5.)Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.(6.)Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Alasan mengapa implementasi kebijakan diperlukan mengacu pada pandangan para pakar bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan.Oleh karena itu, implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif.Berdasarkan perspektif masalah kebijakan, sebagaimana yang diperkenalkan oleh Edwards III (1984:9-10), implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan

dipecahkan. Edwards III memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan mempertanyakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan.

Berdasarkan pertanyaan retorik tersebut dirumuskan empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut merupakan kriteria yang perlu ada dalam implementasi suatu kebijakan. Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan. Luaran program dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat. Luaran implementasi kebijakan adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran. Alasan lain yang mendasari perlunya implementasi kebijakan dapat dipahami dari pernyataan Grindle (1980:10) dan Quade (1984:310) yang mengharapkan agar dapat ditunjukkan konfigurasi dan sinergi dari tiga variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yakni hubungan segi tiga variabel kebijakan, organisasi, dan lingkungan kebijakan. Harapan itu perlu diwujudkan agar melalui pemilihan kebijakan yang tepat masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih perlu diwadahi oleh organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi terdapat kewenangan dan berbagai jenis sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan atau program.

Menurut Tangkilisan (2003:1) Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislative, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya.

Menurut Wahab (1992:45) Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya bersangkutan paut dengan penjabaran-penjabaran keputusan politik dalam prosedur-prosedur rutin lesat saluran birokrasi melainkan lebih dari itu.

Menurut Winarno (2005:101) Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang digunakan.

Menurut Edwards (1980:177) Implementasi kebijakan publik adalah satu tahapan kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Menurut Mustopadidjaja (2002:112) Implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang

muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Menurut Horn (2016:154) implementasi sebagai proses maka proses implementasi merupakan tindakan yang dilakukan, baik individu maupun unit pemerintahan atau suatu yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Sementara menurut Tachjan (2006:25) bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika top-down, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.

Grindle dalam Tachjan (2006 : 14) menyebutkan 3 (tiga) hambatan besar yang setiap kali muncul dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik, yakni : (1) ketiadaan kerjasama vertikal, antara atasan dengan bawahan; (2) hubungan kerja horizontal yang tidak strategis; (3) masalah penolakan terhadap perubahan yang datang dari publik maupun kalangan birokrasi sendiri. Untuk mengatasi hambatan ini, maka pelaksana kebijakan publik perlu memiliki kemampuan beradaptasi dengan kondisi yang berkembang. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik kadangkala tidak hanya memerlukan rasionalitas, tetapi juga kemampuan pelaksana untuk memahami dan merespon harapan-harapan yang berkembang di masyarakat, di mana kebijakan publik tersebut akan dilaksanakan.

Berdasarkan uraian di atas mengenai pengertian kebijakan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses yang dilakukan

setelah kebijakan telah diterapkan dengan tujuan mengatasi suatu permasalahan yang muncul dalam suatu kebijakan dan adanya proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah ketetapan ditetapkan dan disetujui.

2.1.2 Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yaitu: pendekatan top down dan bottom up. Pendekatan top down misalnya dapat disebut sebagai pendekatan yang mendominasi awal perkembangan studi implementasi kebijakan. Inti dari kedua pendekatan ini adalah sejauhmana tindakan para pelaksana (administrator dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan.

Faktor –faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III (1984:9-10):

1. Komunikasi

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implemetor

kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

2. Sumber Daya

Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik.

3. Disposisi atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

4. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan

pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

2.1.3 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Petters (1982:4-5) kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah, baik pelaksanaannya dilakukan secara langsung ataupun melalui wakil, yang mana aktivitas tersebut mempunyai pengaruh terhadap kehidupan warga Negara.

Menurut Abidin (2006:22) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah intervensi pemerintah yang bertujuan untuk mengubah kondisi yang ada atau yang mempengaruhi arah-arrah dan kecepatan perubahan yang sedang berlangsung dalam masyarakat.

Menurut Syafiie (2006:104) Kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan atau sebaliknya, menjadi pengajur inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Berdasarkan uraian di atas mengenai pengertian kebijakan publik, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah jawaban terhadap suatu masalahmasalah dari pemerintah yang bertujuan untuk memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan atau sebaliknya yang sedang berlangsung dalam masyarakat.

2.1.4 Teori-Teori Implementasi Kebijakan Publik

Dalam penerapan implementasi, diperlukan teori pendukung agar penerapan tersebut dalam berjalan dengan baik. Untuk itu, para pakar dan ahli

membuat sebuah teori-teori baru agar proses implementasi dari sebuah kebijakan dapat terlaksana. Adapun teori-teori tersebut, antara lain sebagai berikut :

1. Kebijakan David L. Weimer dan Aidan R. Vining

Dalam pandangan Weimer dan Vining dalam Subarsono (2011:396), ada tiga kelompok variabel besar yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yakni: logika kebijakan, lingkungan tempat kebijakan dioperasikan, dan kemampuan implementor kebijakan.

- a) Logika dari suatu kebijakan. Ini dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal dan mendapat dukungan teoritis.
- b) Lingkungan tempat kebijakan tersebut dioperasikan akan memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, hankam, dan fisik atau geografis.
- c) Kemampuan implementor. Keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan dari implementor kebijakan.

2. Teori Implementasi Model Matland

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori implementasi model Matland. Teori Matland dipilih karena unsur-unsur yang terdapat dalam teori ini sesuai dengan penelitian penulis. Menurut Agostiono (2010:156), teori implementasi model Matland menawarkan model untuk melakukan implementasi dengan memenuhi beberapa syarat, diantaranya:

- a) Ketepatan Kebijakan/ Ketepatan sebuah kebijakan dapat ini dinilai dari: Apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan

karakter masalah yang hendak dipecahkan ; Apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan.

- b) Ketepatan Pelaksanaan. Ketepatan pelaksanaan implementasi kebijakan tidaklah hanya dilaksanakan oleh Pemerintah. Untuk memaksimalkan ketepatan pelaksanaan sebuah aktivitas atau kegiatan, ada tiga unsur dapat bisa menjadi pelaksana selain Pemerintah, yakni kerjasama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization* atau *contracting out*).
- c) Ketepatan Target. Untuk mencapai ketepatan sebuah target dari pelaksanaan kegiatan, maka diperlukan beberapa unsur, yakni : Perencanaan target yang sudah dilaksanakan sesuai dengan yang peraturan yang telah dibuat, tidak ada tumpang tindih dengan aktivitas lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain ; Target yang menjadi sasaran pelaksanaan dalam kondisi siap untuk diintervensi ataukah tidak. Adanya bentuk kesiapan target yang menjadi sasaran bukan secara alami (kondisi lingkungan) saja, namun juga dilihat apakah kondisi target (personal) dalam keadaan baik atau tidak ; Apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaiki implementasi kebijakan sebelumnya.
- d) Ketepatan Lingkungan. Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu: Lingkungan kebijakan yaitu interaksi antara

lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan dengan lembaga yang terkait. Dan Lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri dari atas *public opinion*, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, interpretive institutions yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam sebuah implementasi.

3. Teori Implementasi Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Menurut Agostiono (2010:154), ada enam variabel implementasi yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi pelaksanaan kinerja kebijakan yakni sebagai berikut:

- a) Ukuran dan Tujuan Kebijakan. Adanya sebuah kinerja implementasi kebijakan dapat diukur dari keberhasilannya jika tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan.
- b) Sumberdaya. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
- c) Karakteristik Agen Pelaksana. Adanya fokus perhatian pada agen pelaksana (pelaksana kegiatan) mencakup organisasi formal dan organisasi informal yang melibatkan pengimplementasian kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi serta sesuai dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan untuk menentukan agen

pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan tersebut, maka akan semakin besar pula agen yang dilibatkan.\

- d) Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana. Adanya sikap penerimaan atau penolakan yang dilakukan oleh agen pelaksana (pelaksana kegiatan) akan banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini dapat dilihat oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi orang-orang yang terkait langsung terhadap kebijakan yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.
- e) Komunikasi Antar organisasi dan Aktivitas Pelaksana. Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Ada tidaknya sebuah kondisi koordinasi komunikasi yang baik, dapat dilihat dari bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah proses implementasi mengutarakan asumsi kesalahannya begitu pula sebaliknya.
- f) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam persepektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa teori implementasi kebijakan publik adalah teori yang mengemukakan tentang keberhasilan dari kebijakan publik dapat dilihat dari berbagai macam hal, antara lain : lingkungan kebijakan, ketepatan kebijakan, ketetapan pelaksanaan, sumber daya, kemampuan implementor/pelaksana, sikap implementor/pelaksana, komunikasi yang efektif dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

2.2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 di Kota Medan

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Dalam Rangka Pelaksanaan Pendidikan Diniyah Takmilyah di Kota Medan bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan beragama kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya yang berilmu, beriman, bertaqwa, beramal shaleh dan berakhlak mulia serta menjadi warga negara yang mempunyai kepribadian, percaya diri, sehat jasmani dan rohani serta berguna bagi masyarakat, bangsadan negara. Serta disediakan sarana fasilitas pendidikan madrasah Takmilyah oleh penyelenggara pendidikan dengan kebutuhan masing masing lembaga yang membutuhkan.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang MDTA adalah sebuah kebijakan yang ditetapkan secara bersama antara Pemerintah Daerah Kota Medan (eksekutif) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan (Legislatif). Kebijakan ini ditetapkan dan diperdakan pada tanggal 17 Juni 2014 di kota Medan. Perda Madrasah Diniyah Takmilyah Awaliyah atau yang disingkat MDTA ini adalah berawal dari minimnya pendidikan agama yang diserap oleh generasi muda di kota Medan. Tantangan modernisasi yang dirasakan di Indonesia umumnya di kota Medan khususnya tentu berdampak negatif terhadap

perkembangan kepribadian masyarakat yang tercermin dalam adat istiadat masyarakat berbudaya timur.

Adapun pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut antara lain:

- a. Pasal 1 angka 18 mengatakan Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- b. Pasal 6 ayat 1 mengatakan setiap Warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- c. Pasal 17 ayat 2 mengatakan pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

2.3. Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliyah

Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliyah adalah suatu satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi siswa Sekolah Dasar (SD/Sederajat), yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat dasar dengan masa belajar 4 (empat) tahun dan jumlah jam belajar minimal 18 jam pelajaran seminggu. Madrasah Diniyah ini adalah satu lembaga pendidikan keagamaan pada jalur luar sekolah yang diharapkan mampu secara terus menerus memberikan pendidikan agama Islam kepada anak didik yang tidak terpenuhi pada jalur sekolah yang diberikan melalui sistem klasikal serta menerapkan jenjang pendidikan.

Madrasah Diniyah merupakan madrasah yang seluruh mata pelajarannya bermaterikan ilmu-ilmu agama, yaitu fiqih, tafsir, tauhid dan ilmu-ilmu agama lainnya. Dengan materi agama yang demikian padat dan lengkap, maka memungkinkan para peserta didik yang belajar didalamnya lebih baik penguasaannya terhadap ilmu-ilmu agama. Madrasah Diniyah merupakan bagian dari sistem pendidikan formal pesantren. Madrasah Diniyah ini menjadi pendukung dan melengkapi kekurangan yang ada dalam sistem pendidikan formal pesantren, sehingga antara pendidikan pesantren dan pendidikan diniyah saling terkait. Posisi Madrasah Diniyah adalah sebagai penambah dan pelengkap dari sekolah pendidikan formal yang dirasa pendidikan agama yang diberikan disekolah formal hanya sekitar 2 jam dirasa belum cukup untuk menyiapkan keberagaman anaknya sampai ketinggian yang memadai untuk mengarungi kehidupannya kelak. Jadi Madrasah Diniyah merupakan pendidikan non formal metode klasikal dengan seluruh mata pelajaran yang bermaterikan agama yang sedemikian padat dan lengkap sehingga memungkinkan peserta didik yang belajar didalamnya lebih baik penguasaannya terhadap ilmu-ilmu agama. Dasar Hukum Pelaksanaan MDTA di Kota Medan Peraturan daerah merupakan produk perundang-undangan pemerintah daerah atau merupakan hasil kompromis antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Kepala daerah yang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pemerintah Kota Medan berinisiatif untuk mengajukan rancangan peraturan daerah tentang wajib belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah yang merupakan sistem pendidikan agama nonformal yang dilaksanakan diluar sekolah. Tujuannya yaitu untuk memberikan bekal kemampuan beragama bagi

peserta didik dalam mengembangkan kehidupan sebagai umat muslim berilmu, beriman, bertaqwa, beramal, dan berakhlak mulia serta menjadi manusia yang berkepribadian bagi dan berguna bagi bangsa Indonesia.

Tantangan yang dimaksud adalah semakin tergerusnya nilai-nilai kebudayaan dan keagamaan pada masyarakat akibat pengaruh kebudayaan asing yang dimediasi oleh kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuan. Berkenaan dengan tuntutan guru-guru madrasah agar pemerintah kota Medan memiliki regulasi yang mengatur kewajiban untuk memperoleh pendidikan di madrasah. Regulasi yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

BAB III

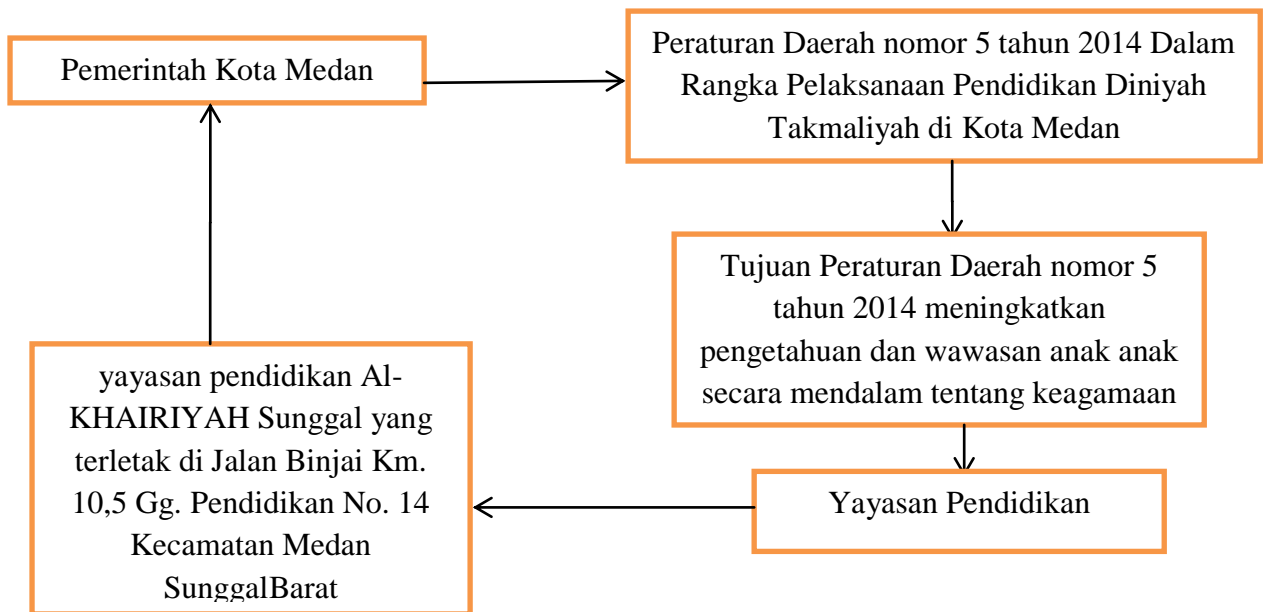
METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, dengan analisis secara kualitatif. Dipilihnya desain penelitian ini karena metode deskriptif adalah suatu metode yang meneliti suatu kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran maupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta fakta, sifat sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.(Nazir 1988:63) selain itu pertimbangan lainnya adalah dengan mengingat luasnya cakupan penelitian yang dilakukan, sehingga diharapkan mampu menggiring peneliti dekat dengan subjek subjeknya dan sensitive terhadap konseks. Selain itu desain penelitian ini diharapkan mampu memberikan kemungkinan informasi yang lebih luas untuk mendeskripsikan realitas yang ada (Branen 2002:90).

3.2. Kerangka Konsep

Pelaksanaan penelitian, kerangka konsep dibuat untuk mempermudah dalam pembuatan skripsi dan menjadikan penilaian lebih sistematis. Selain itu, kerangka konsep menjadikan penelitian lebih terarah. Berdasarkan judul penelitian, maka batasan-batasan konsep yang dipakai dalam penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.1. Kerangka Konsep Penelitian

3.3. Definisi Konsep

Woodruff (1987:48) Konsep adalah suatu gagasan/ide yang relatif sempurna dan bermakna, suatu pengertian tentang suatu objek, produk subjektif yang berasal dari cara seseorang membuat pengertian terhadap objek-objek atau benda-benda melalui pengalamannya (setelah melakukan persepsi terhadap objek/benda). Definisi Konsep Sekumpulan gagasan atau ide yang sempurna dan bermakna berupa abstrak, entitas mental yang universal dimana mereka bisa diterapkan secara merata untuk setiap ekstensinya sehingga konsep membawa suatu arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama dan membentuk suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang dirumuskan.

- a. Implementasi merupakan Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan
- b. Kebijakan Publik adalah jawaban terhadap suatu masalahmasalah dari pemerintah yang bertujuan untuk memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan atau sebaliknya yang sedang berlangsung dalam masyarakat.
- c. Implementasi Kebijakan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah tahapan dimana keputusan dibuat dan dijalankan guna mencapai tujuan tertentu secara maksimal dan terarah.
- d. Implementasi Kebijakan Publik adalah proses yang dilakukan setelah kebijakan telah diterapkan dengan tujuan mengatasi suatu permasalahan yang muncul dalam suatu kebijakan dan adanya proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah ketetapan ditetapkan dan disetujui.
- e. Madrasah Diniyah merupakan madrasah yang seluruh mata pelajarannya bermaterikan ilmu-ilmu agama, yaitu fiqih, tafsir, tauhid dan ilmu-ilmu agama lainnya. Dengan materi agama yang demikian padat dan lengkap, maka memungkinkan para peserta didik yang belajar didalamnya lebih baik penguasaanya terhadap ilmu-ilmu agama.

3.4. Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2014 Di pendidikan Al-Khairiyah Sunggal terkait Pelaksanaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah.

Berikut beberapa kategorisasi dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Adanya tujuan keberhasilan yang dicapai dalam melaksanakan kebijakan secara maksimal dan terarah
- b. Adanya tindakan untuk mencapaitujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan.
- c. Adanya sumber daya manusia yang berkontribusi dalam menjalankan kebijakan.
- d. Adanya proses pelaksanaan kewajiban dalam menjalankan kebijakan.

3.5. Informan atau Narasumber

Narasumber adalah orang yang akan menjadi informasi bagi penelitian dalam mencari informasi mengenai permasalahan atau fokus penelitian tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kota Medan, yaitu:

- 1) Kepala Yayasan sekaligus Kepala Sekolah di YP. Al-Khairiyah, Ibu Aniyah S.Pd.
- 2) Sekretaris Yayasan sekaligus Kepala Sekolah SMP/IT di YP. Al-Khairiyah, Bapak Muhammad Sirajul Fuad SP.
- 3) Orang tua murid, Ibu Syahrina Khadir Nasution.
- 4) Orang tua murid, Ibu Asih Sudarmo Tanjung.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 136) teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

a. Wawancara

Menurut P. Joko Subagyo (2011:39) Suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. wawancara bermakna berhadapan langsung antara interview dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.

b. Observasi

Menurut Supriyati (2011:46) Suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian dengan mempunyai sifat dasar naturalistik yang berlangsung dalam konteks natural, pelakunya berpartisipasi secara wajar dalam interaksi.

c. Dokumentasi

Menurut Umi Narimawati, Sri Dewi Anggadini, Lina Ismawati (2010:39) Pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang terdapat pada perusahaan.

3.7. Teknik Analisis Data

Dalam metode ini, data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan sehingga permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dengan mudah dipahami dan bisa menjawab isu-isu permasalahan dalam objek penelitian ini.

3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian

3.8.1 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di kota Medan yang berlokasi di Madrasah Yayasan Pendidikan AL-KHAIRIYAH Sunggal.

3.8.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang digunakan peneliti untuk melakukan riset penelitian mulai dari hari Kamis, 04 November 2020 mulai dari pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai.

3.8.3 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

1. Gambaran Umum MTS Yayasan Pendidikan Al-Khairiyah Sunggal



Sumber data: Hasil penelitian di YP. Al-Khairiyah Sunggal, 2020

MTS. Yayasan Pendidikan Al-Khairiyah Sunggal mulai berdiri sejak tahun 1967, yang memiliki tujuan sebagai upaya dan tindak lanjut kebutuhan peserta didik yang ingin meneruskan pendidikan di jenjang belajar. Pada awalnya kurikulum yang digunakan oleh Yayasan Pendidikan Al-Khairiyah menggunakan kurikulum diniyah plus, dengan mengedepankan pelajaran agama yang diambil dari kitab-kitab para ulama dan salaf pembaharu, seperti kitab-kitab yang mempelajari bahasa arab, seperti ilmu nahwu, ilmu shorof dan ilmu balaghoh. Demikian juga dengan mata pelajaran umum seperti ilmu bumi, ilmu berhitung

dan lain sebagainya sesuai dengan perkembangan yang ada pada masa itu. Namun pada perkembangannya, saat ini MTS Yayasan Pendidikan Al-Khairiyah memakai kurikulum berdasarkan Departemen Agama yang dimulai pada tahun 1978/1979 hingga saat ini.

MTS. Yayasan Pendidikan Al-Khairiyah Sunggal saat ini telah mendirikan 4 jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP dan MDTA. Mata pelajaran TK, SD dan SMP adalah mata pelajaran umum namun tetap mengutamakan nilai-nilai keislaman, sedangkan untuk MDTA jenjang ini hanya sampai 4 tahun, kemudian sifatnya non formal (boleh diikuti oleh siswa boleh tidak). MDTA juga hanya mempelajari ilmu agama, seperti mengaji, arab gundul, tulisan arab dan sejarah islam.

2. Visi dan Misi

Visi dari MTS. Yayasan Pendidikan Al-Khairiyah adalah “Mewujudkan manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri, dimulai dari pendidikan sekolah tingkat dasar”.

Adapun **Misi** dari MTS. Yayasan Pendidikan Al-Khairiyah, antara lain:

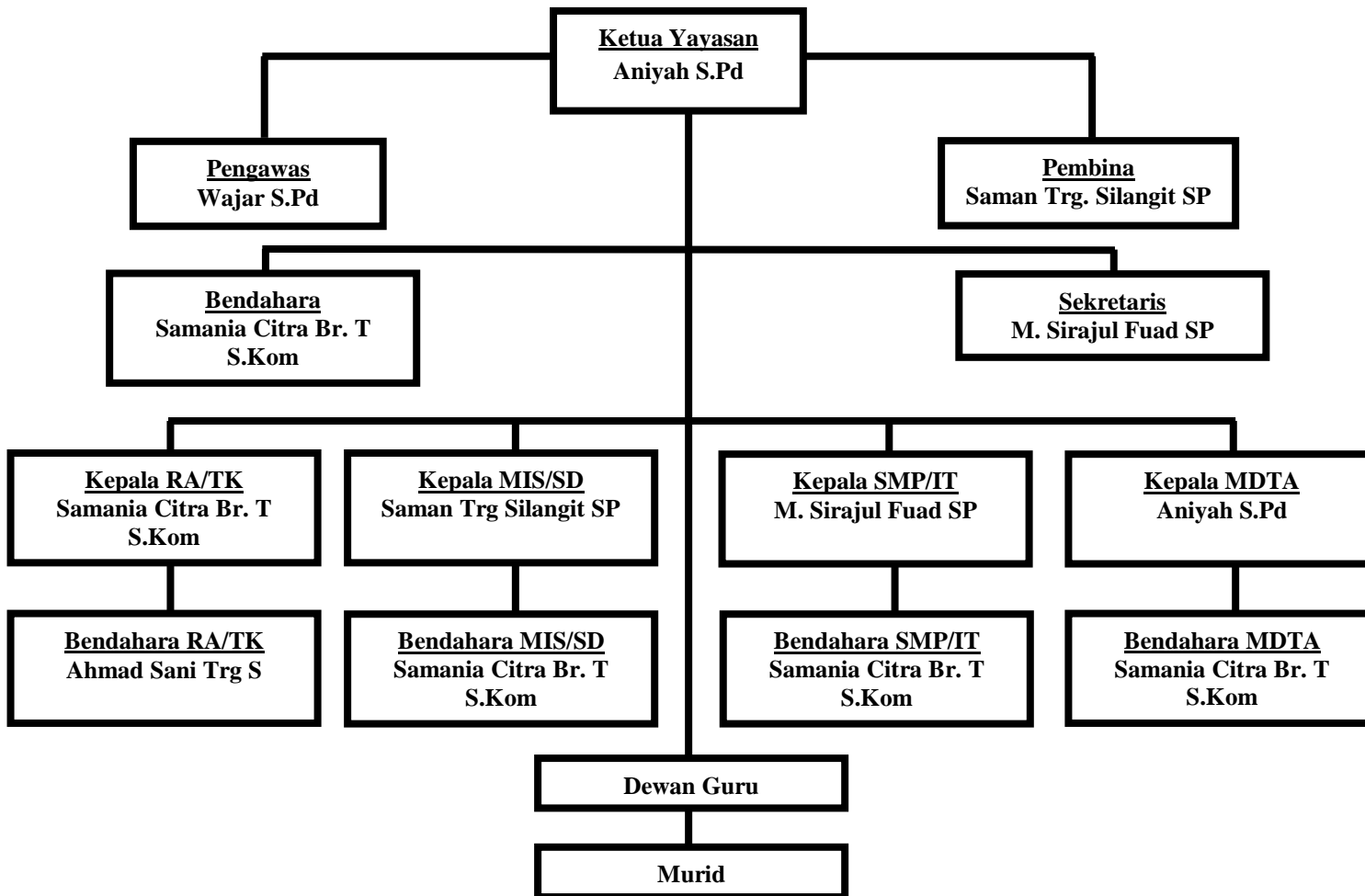
- a. Membentuk manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Membina kebersamaan antara siswa, guru, orang tua, masyarakat dan Pemerintah untuk mewujudkan pendidikan di Madrasah
- c. Menanamkan budi pekerti, sopan santun, kemandirian dan kedisiplinan
- d. Melaksanakan proses pendidikan yang dinamis, kreatif dan inovatif

- e. Menciptakan keteladanan dalam berperilaku islami dan berbudi pekerti luhur

3. Tujuan dan Sasaran

Adapun **tujuan** MTS. Yayasan Pendidikan Al-Khairiyah adalah untuk mendidik siswa agar dapat meningkatkan ilmu pengetahuan, pendidikan dan keterampilan yang bernuansa islami dan sesuai dengan kaidah-kaidah islam. Sedangkan **sasaran** dari MTS. Yayasan Pendidikan Al-Khairiyah adalah untuk menarik minat masyarakat, khususnya orang tua agar mau mendaftarkan anaknya di MTS. Yayasan Pendidikan Al-Khairiyah dengan metode pelajaran, sistem pembayaran, kegiatan ekstrakurikuler yang disediakan MTS. Yayasan Pendidikan Al-Khairiyah.

4. Struktur Organisasi Yayasan Pendidikan Al-Khairiyah Sunggal



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini, penulis akan menyajikan deskripsi data yang diperoleh pada saat penelitian di lapangan melalui metode-metode pengumpulan data yang telah disebutkan dalam bab yang terdahulu. Pengumpulan data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan secara mendalam beberapa tahapan yang dilakukan penulis diantaranya:

Pertama, penelitian diawali dengan pengumpulan data beserta dokumentasi penelitian terkait dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara terstruktur dengan sumber-sumber yang relevan dengan penelitian, sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengambil gambar untuk kelengkapan data, seperti visi dan misi YP Al-Khairiyah, susunan struktur organisasi dan lain sebagainya.

Wawancara dilakukan dengan 4 orang informan penelitian yang terdiri dari 1 orang Kepala Yayasan di YP. Al-Khairiyah Sunggal, 1 orang staff pengajar (guru) dan 2 orang orang tua murid. Sesi wawancara dilaksanakan YP. AL-Khairiyah Sunggal pada tanggal 4-5 November 2020 pada waktu yang telah ditentukan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan peneliti serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data-data tersebut berupa pernyataan dari narasumber mengenai permasalahan skripsi yang digunakan untuk menjawab

setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sebagai data yang dipergunakan dalam analisis penelitian pada bab ini.

Berikut adalah penyajian data-data yang diperoleh melalui wawancara dengan berbagai informan penelitian penulis. Adapun daftar dalam pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan kategorisasi dalam penelitian yang juga merupakan kunci guna menjawab fenomena yang diteliti.

4.2 Deskripsi Hasil Wawancara

4.2.1 Adanya tujuan yang dicapai dalam melaksanakan kebijakan secara maksimal dan terarah

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Kamis, tanggal 4 November 2020 dengan ibu Aniyah S.Pd, selaku Ketua Yayasan dan Kepala MDTA di YP. Al-Khairiyah Sunggal tentang implementasi tujuan yang dicapai dalam melaksanakan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2014 dalam rangka pelaksanaan pendidikan Diniyah Takmiliah di YP. Al-Khairiyah, menyatakan bahwa tujuan pembelajaran sekolah sudah sesuai dengan peraturan daerah tersebut. Hal ini dikarenakan setiap Madrasah wajib melaksanakan aturan yang telah ditetapkan dan hal tersebut sudah merupakan kewajiban.

Mengenai cara apa saja yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan pendidikan Diniyah Takmiliah di YP. Al-Khairiyah, Beliau menjelaskan bahwa cara yang mereka lakukan adalah dengan mengirimkan laporan seluruh aktivitas kegiatan yang dilakukan YP. Al-Khairiyah kepada pusat dan melakukan pengawasan secara berkala secara 2 bulan sekali. Hal ini bertujuan agar dapat meninjau dan mengevaluasi sistem yang sudah dilakukan YP. Al-

Khairiyah dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan Diniyah Takmiliah.

Beliau juga menambahkan bahwa sampai saat ini, seluruh staff dan anggota YP. Al-Khairiyah, mulai dari kepala yayasan, kepala sekolah, guru, staff administrasi, siswa sampai orang tua siswa wajib ikut serta dalam melaksanakan segala bentuk aktivitas kegiatan yang berhubungan dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini agar nantinya hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan secara efektif dan maksimal, karena seluruh masyarakat YP. Al-Khairiyah ikut serta melaksanakan tujuan tersebut dengan baik.

Beliau juga menjelaskan bahwa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan tujuan pendidikan Diniyah Takmiliah di YP. Al-Khairiyah adalah kendala dalam bidang penyelenggaraan dana BOS dan materi buku untuk sekolah. Hal ini disebabkan karena khususnya pada masa pandemi Covid-19, anggaran dana Bos dipotong untuk bantuan Covid-19, kemudian aturan dari Kementerian Agama dengan Dinas Pendidikan berbeda, mulai dari masalah penyediaan buku paket, fasilitas dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Kamis, tanggal 4 November 2020 dengan Bapak Muhammad Sirajul Fuad SP, selaku sekretaris Yayasan dan Kepala Sekolah SMP/IT di YP. Al-Khairiyah Sunggal tentang implementasi tujuan yang dicapai dalam melaksanakan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2014 dalam rangka pelaksanaan pendidikan Diniyah Takmiliah di YP. Al-Khairiyah, menyatakan bahwa sampai saat ini pendidikan yang dilaksanakan di YP. Al-Khairiyah sudah berjalan sesuai dengan ketentuan Perda nomor 5 tahun 2014. YP. Al-Khairiyah wajib melaksanakan aturan sesuai dengan

Perda nomor 5 tahun 2014 karena memang sudah keharusan dari Kementerian Agama.

Sampai saat ini, upaya yang telah dilakukan YP. Al-Khairiyah dalam mencapai tujuan yang sesuai dengan kebijakan tersebut adalah dengan selalu menuruti segala bentuk peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kemudian, agar dapat mengetahui bagaimana kinerja yang telah dilaksanakan, biasanya setiap wali kelas akan memberikan laporan bagaimana prestasi siswa dalam mengikuti pembelajaran untuk mengetahui sejauhmana siswa dapat mengikuti program pembelajaran yang telah diterapkan.

Beliau juga menjelaskan bahwa seluruh orang-orang yang terlibat di YP. Al-Khairiyah wajib ikut serta melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan pendidikan Diniyah Takmiliyah yang baik dan efektif. Dengan menjalankan seluruh kebijakan dengan baik, maka menurut Beliau hasil yang didapat atau tujuan akan berjalan dengan baik.

Untuk kendala yang ditemukan dalam melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan, Beliau menyatakan bahwa terdiri dari beberapa faktor, antara lain: dari segi anggaran dana, seperti BOS yang mengalami penurunan jumlah karena pandemi Covid 19 ini dan pencairan dana BOS yang tidak tepat waktu. Selain itu, adanya kasus seperti siswa yang *broken home* yang disekolahkan disini tentunya dapat sedikit menghambat pencapaian pelaksanaan pendidikan Diniyah Takmiliyah yang efektif. Namun hal tersebut tidak mengganggu proses belajar mengajar, karena setiap guru telah mempersiapkan solusi dalam mengatasi hal tersebut.

Selain itu, kendala yang ditemukan dari faktor eksternal, seperti pada masa pandemi Covid 19 ini ada perbedaan sistem belajar antara sekolah umum (negeri) dengan YP. Al-Khairiyah. Untuk sekolah umum sendiri, diketahui sedang dalam masa belajar daring (*online*), sedangkan untuk YP. Al-Khairiyah tetap belajar dikelas seperti biasa. Tentunya hal tersebut menimbulkan pro dan kontra, khususnya bagi orang tua siswa. Namun dengan sosialisasi dan informasi, orang tua dapat mengerti bagaimana prosedur yang dijalankan YP. Al-Khairiyah tetap pada prosedur penanganan Covid-19 untuk sistem pembelajaran.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Jumat, tanggal 5 November 2020 dengan Ibu Syahrina Khadir Nasution selaku orang tua siswa yang mengantarkan anaknya ke YP. Al-Khairiyah Sunggal tentang tujuan yang dicapai dalam melaksanakan kebijakan secara maksimal dan terarah, menyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan Diniyah Takmiliah yang dilaksanakan oleh YP Al-Khairiyah sudah sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut. Hal ini dikarenakan anak dari Beliau telah dapat menghafalkan ayat dan surat-surat dalam Al-Quran dengan baik dan mendapat nilai yang baik pula.

Kemudian menurut Beliau, upaya atau cara yang telah dilakukan YP. Al-Khairiyah dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut dengan selalu mewajibkan siswa untuk menghafal ayat dan surat dalam Al-Quran dalam kurun waktu tertentu dan sering melakukan pengulangan. Di YP. Al-Khairiyah anak-anak diwajibkan menguasai ilmu agama dengan baik serta menerapkan nilai dan moral-moral sesuai dengan kaidah keislaman.

Menurut Beliau, yang harus ikut serta dalam pelaksanaan kebijakan tersebut adalah seluruh guru dan siswa. Kalau para orang tua hanya sebagai suport

dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, misalnya dengan membayar iuran sekolah, membayar LKS yang telah disediakan dengan baik dan mendidik anak dirumah sesuai dengan kaidah keislaman yang telah diajarkan di YP. Al-Khairiyah.

Beliau juga menambahkan bahwa sepengetahuan Beliau kendala yang dirasa belum efektif dalam pelaksanaan tujuan berdasarkan kebijakan tersebut adalah kelengkapan buku pelajaran sekolah yang disediakan serta terkadang ada orang tua yang mendaftarkan anaknya disini namun masih sulit dalam membaca dan mengaji, sehingga tertinggal jauh dengan anak-anak yang sudah belajar di YP. Al-Khairiyah sejak awal dan dapat mengganggu efektivitas pembelajaran karena guru menjadi lebih fokus ke anak tersebut. Namun secara keseluruhan pencapaian tujuan pembelajaran yang dilakukan YP. Al-Khairiyah sudah berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Jumat, tanggal 5 November 2020 dengan Ibu Asih Sudarmo Tanjung selaku orang tua siswa yang mengantarkan anaknya ke YP. Al-Khairiyah Sunggal tentang tujuan yang dicapai dalam melaksanakan kebijakan secara maksimal dan terarah, menyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan yang dijalankan YP. Al-Khairiyah dalam mencapai tujuan pendidikan yang bermutu sudah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari program-program yang dijalankan YP. Al-Khairiyah dalam proses pembelajaran kepada siswa mereka. Selain itu, YP. Al-Khairiyah juga berusaha semaksimal mungkin mendidik anak-anak agar mendapat pengetahuan islam yang sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku.

Sepengetahuan Beliau, cara atau upaya yang sudah dilakukan YP. Al-Khairiyah dalam melaksanakan tujuan pendidikan Diniyah Takmiliah yang sesuai dengan kebijakan adalah dengan menerapkan norma-norma yang sesuai dengan nilai keislaman, memprioritaskan pelajaran islam bagi siswa, mendidik siswa untuk melakukan semua sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran islam dan mempunyai target pada pendidikan siswa, seperti hapalan ayat dan surat, membaca Al-Quran dengan lancar dan lain sebagainya. Selain itu, fasilitas yang disediakan oleh YP. Al-Khairiyah juga sudah sangat lengkap, seperti internet untuk kebutuhan siswa, UKS, perpustakaan dan laboratorium untuk siswa.

Beliau juga menambahkan bahwa yang ikut serta dalam melaksanakan peraturan dan tujuan tersebut adalah seluruh orang-orang yang berada di YP. Al-Khairiyah, termasuk para orang tua murid dalam membantu mendidik dan memberikan suport kepada siswa.

Menurut Beliau, kendala yang ditemukan guru dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan kebijakan adalah buku paket sekolah yang belum lengkap. Hal ini disebabkan karena biaya buku yang sangat mahal dan untuk seluruh mata pelajaran siswa sangat membebani para orang tua, khususnya yang kalangan menengah kebawah.

4.2.2 Adanya tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Kamis, tanggal 4 November 2020 dengan ibu Aniyah S.Pd, selaku Ketua Yayasan dan Kepala MDTA di YP. Al-Khairiyah Sunggal tentang tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang sesuai dengan Peraturan

Daerah nomor 5 tahun 2014 dalam rangka pelaksanaan pendidikan Diniyah Takmiliah di YP. Al-Khairiyah, menyatakan bahwa strategi yang dilakukan YP. Al-Khairiyah adalah membuat dan melaksanakan sistem pembelajaran yang efektif dan efisien bagi siswa, memberikan informasi yang detail pada saat penerimaan siswa siswi baru, melaksanakan metode belajar berdasarkan kurikulum dari Kementerian Agama, mencoba melengkapi fasilitas-fasilitas pembelajaran bagi siswa dan melibatkan orang tua dalam mengambil keputusan pembelajaran siswa.

Kemudian, untuk program-program yang sudah dilaksanakan YP. Al-Khairiyah adalah: memprioritaskan siswa untuk dapat menghafal ayat dan surat dengan cara setoran hapalan setiap minggunya dengan target yang telah ditetapkan, misalnya untuk tingkat SD, maka surat-surat pendek yang menjadi prioritas dan semakin tinggi jenjang kelas, maka hapalan juga akan semakin bertambah dan panjang. Hal ini dilakukan agar nantinya siswa dapat memiliki hapalan bacaan Al-Quran dengan baik.

Beliau juga menjelaskan sampai saat ini program atau metode yang mereka lakukan dalam proses pembelajaran siswa sudah berjalan dengan efektif. Hal ini diketahui dari respon dan komentar orang tua siswa yang merasa puas setelah anaknya memiliki pengetahuan dan hapalan agama yang baik dan dapat menerapkan ilmu-ilmu agama yang telah diajarkan dengan baik.

Untuk jangka waktu yang telah ditentukan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Beliau menjelaskan bahwa hal ini terjadi secara kondusif. Untuk pencapaian tujuan pembelajaran siswa yang efektif biasanya target yang ditetapkan adalah per semester Jadi dalam jangka waktu per semester (6 bulan),

siswa harus mencapai target pendidikan yang telah ditetapkan di RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). Namun jika dikaji secara keseluruhan, maka waktu yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan adalah 1 tahun (sesuai dengan tahun ajaran baru sekolah).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Kamis, tanggal 4 November 2020 dengan Bapak Muhammad Sirajul Fuad SP, selaku sekretaris Yayasan dan Kepala Sekolah SMP/IT di YP. Al-Khairiyah Sunggal tentang tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut, menyatakan bahwa strategi yang dilakukan guru maupun YP. Al-Khairiyah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah dengan mengadakan proses belajar mengajar yang efektif, seperti membuat setoran wajib hapalan ayat dan surat, secara rutin agar target hapalan yang telah ditetapkan dapat terealisasi oleh siswa dengan baik, memberikan LKS (Lembar Kerja Siswa) untuk pelatihan siswa setelah proses belajar mengajar, kemudian mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang bernuansa islami seperti membaca Al-Quran, saritilawa, melagukan Al-Quran bahkan ekstrakurikuler yang sifatnya umum seperti sepak bola, renang, seni tari dan drama. Hal ini dilakukan untuk memberikan semangat belajar bagi para siswa.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan baik dari pusat maupun YP. Al-Khairiyah sendiri, Beliau menjelaskan bahwa standart ketentuan waktu yang telah ditetapkan YP. Al-Khairiyah adalah 1 tahun. Dalam kurun waktu 1 tahun, proses pembelajaran yang telah dirangkum dalam RPP (Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran) harus dapat terealisasi dengan baik dengan akumulatif nilai siswa yang baik dan sesuai dengan standart. Selain itu, untuk mencapai tujuan

pembelajaran yang baik sesuai dengan kebijakan, YP. AL-Khairiyah juga bekerjasama dengan pihak-pihak sponsor, seperti sponsor *Faber castle* (cat krayon), mengadakan Pensi, melakukan cek kesehatan, sponsor shampo, pembersih muka, makanan dan minuman dan lain sebagainya. Hal ini diharapkan dapat menambah semangat belajar siswa dan ketertarikan orang tua untuk menyekolahkan anaknya di YP. Al-Khairiyah karena banyak program-program bermanfaat yang disajikan.

Beliau juga menjelaskan bahwa sampai saat ini program yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sudah berjalan dengan efektif. Setiap program selalu berhasil dilaksanakan dengan baik, dengan kualitas yang baik dan tentunya dapat bermanfaat bagi siswa.

Namun, dalam pelaksanaan program-program tersebut, tentunya tidak dipungkiri pasti mengalami kendala. Menurut Beliau, kendala yang ditemukan dalam melaksanakan program-program pembelajaran tersebut adalah kurangnya penyediaan sarana buku pelajaran (buku paket) untuk panduan belajar siswa. Hal ini disebabkan tidak adanya dana bantuan dari Kementerian Agama untuk mensupport buku-buku demi menunjang sistem pembelajaran. Dari segi orang tua juga menjadi salah satu penghambat, dikarenakan sebagian besar orang tua siswa merasa keberatan atau tidak mampu jika buku paket dibeli secara keseluruhan secara pribadi. Maka dari itu, solusi yang dilaksanakan oleh YP. Al-Khairiyah adalah memberikan sistem pembelajaran yang aktif agar lebih banyak ilmu yang dapat digali oleh siswa.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Jumat, tanggal 5 November 2020 dengan Ibu Syahrina Khadir Nasution selaku orang tua

siswa yang mengantarkan anaknya ke YP. Al-Khairiyah Sunggal tentang tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan, menyatakan bahwa menurut Beliau, program-program yang selalu dilaksanakan oleh YP. Al-Khairiyah adalah Muqadarah (penampilan pidato dalam bahasa arab), membaca Al-Quran, menghafal ayat dan surat, saritilawa, dan melagukan Al-Quran.

Program-program tersebut juga sudah berjalan dengan efektif. Hal ini dibuktikan dengan anak-anak yang belajar di YP. Al-Khairiyah sudah dapat membaca Al Quran dengan lancar, untuk anak SD nya sudah banyak menguasai doa-doa, ayat dan surat pendek dengan baik, melagukan bacaan Al-Quran dengan baik, memiliki sikap dan perilaku yang baik dan lain sebagainya.

Untuk masalah waktu yang dibutuhkan anak dalam mencapai maksimal belajar di YP. Al-Khairiyah, Beliau menjelaskan untuk anaknya sendiri dalam jangka 1 tahun sudah mencapai apa yang diinginkan. Dalam satu tahun anak-anak sudah mendapat nilai yang baik dengan pelajaran agama islam yang baik. Kemudian untuk kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan program tersebut, Beliau menjelaskan bahwa Beliau tidak mengetahui perihal tersebut dikarenakan itu terjadi antar guru dengan murid.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Jumat, tanggal 5 November 2020 dengan Ibu Asih Sudarmo Tanjung selaku orang tua siswa yang mengantarkan anaknya ke YP. Al-Khairiyah Sunggal tentang tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan, menyatakan bahwa sepengetahuan Beliau, program-program yang dilaksanakan YP. Al-Khairiyah adalah proses belajar mengajar yang efektif seperti menghafal ayat dan

surat, membuat les belajar, dan lainnya, kemudian kegiatan ekstrakurikuler yang bernuansa islami seperti berpidato dalam bahasa arab, membaca Al-Quran, melagukan Al-Quran dan lainnya.

Menurut Beliau, program-program yang dilaksanakan ini sangat efektif untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan siswa dalam belajar agama Islam dan mengerti tentang seluk beluk Islam secara lebih dalam. Selain itu, banyak nilai-nilai moral yang juga diajarkan di YP. Al-Khairiyah agar sikap dan perilaku para siswanya juga menjadi semakin baik.

Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, Beliau juga menjelaskan khususnya untuk anak Beliau sendiri hanya dalam jangka waktu 1 tahun sang anak sudah banyak membaca dan menghafal ayat-ayat dan surat-surat yang diberikan oleh guru. Selain itu, pada pelajaran umum, sang anak juga dapat menguasai dengan baik karena guru sangat terlatih dalam proses belajar dan mengajar.

Menurut Beliau, kendala yang ditemukan khususnya guru dalam melaksanakan program atau proses belajar mengajar adalah tidak semua anak memiliki tingkat kemampuan yang sama. Maka terkadang ada yang sudah dapat menguasai pelajaran dengan baik dan ada yang belum menguasai pelajaran dengan baik.

4.2.3 Adanya sumber daya manusia yang berkontribusi dalam menjalankan kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Kamis, tanggal 4 November 2020 dengan ibu Aniyah S.Pd, selaku Ketua Yayasan dan Kepala MDTA di YP. Al-Khairiyah Sunggal tentang sumber daya manusia yang

berkontribusi dalam menjalankan kebijakan, menyatakan bahwa keahlian guru-guru yang mengajar di YP. Al-Khairiyah ini harus sesuai dengan materi pembelajaran atau bidangnya. Misalnya untuk guru dengan jurusan pendidikan agama harus mengajar materi pembelajaran agama, dan untuk materi pembelajaran dibidang lain. Hal ini dilakukan agar materi pembelajaran yang diajarkan dan diterima siswa menjadi lebih efektif.

Sampai saat ini tim pengajar (guru) yang berada di YP. Al-Khairiyah adalah 27 orang guru. Beliau menambahkan bahwa, YP. Al-Khairiyah belum dapat menambah staff pengajar dikarenakan keterbatasan gaji yang diberikan kepada guru-guru. Namun, hingga saat ini dengan staff pengajar tersebut, YP. Al-Khairiyah dapat memberikan materi pembelajaran yang maksimal kepada para siswa karena guru-guru yang telah berkompeten dan profesional dibidangnya masing-masing.

Kemudian, kendala yang ditemukan guru-guru dalam melaksanakan tugas sebagai tim pengajar adalah kekurangan materi buku paket untuk siswa. Beliau menegaskan bahwa sampai saat ini siswa hanya berpedoman kepada LKS (Lembar Kerja Siswa) saja. Sampai saat ini, Kementerian Agama hanya menyediakan buku pedoman pengajaran untuk guru saja, namun tidak untuk siswa. Selain itu, keterbatasan sebagian besar orang tua dalam membeli buku paket mandiri untuk siswa juga menjadi kendala bagi guru dalam memaksimalkan proses belajar mengajar.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Kamis, tanggal 4 November 2020 dengan Bapak Muhammad Sirajul Fuad SP, selaku sekretaris Yayasan dan Kepala Sekolah SMP/IT di YP. Al-Khairiyah Sunggal

tentang sumber daya manusia yang berkontribusi dalam menjalankan kebijakan, menyatakan bahwa keahlian staff yang harus dipenuhi ketika menjadi tim pengajar di YP. AL-Khairiyah adalah staff yang berkompeten dibidangnya. Beliau menambahkan bahwa YP. AL-Khairiyah adalah sistem pembelajaran dengan menempatkan staff pengajar secara linier, artinya jurusan yang telah diambil seorang guru dalam pendidikan, itulah yang mereka ajarkan disini, seperti jurusan B.Ingggris, untuk materi pembelajaran B.Ingggris, jurusan pendidikan agama untuk materi pembelajaran agama. Namun poin pentingnya adalah setiap guru juga wajib memiliki pengetahuan agama dengan baik, agar dapat memaksimalkan metode pendidikan bernuansa islami dengan baik.

Sampai saat ini, staff guru yang bekerja menjadi pengajar di YP. Al-Khairiyah berjumlah 27 orang guru. YP. Al-Khairiyah belum dapat menambah staff pengajar dikarenakan keterbatasan dana dalam menerima guru-guru baru. Hal ini dikarenakan jumlah siswa yang mendaftar tidaklah terlalu banyak sehingga membutuhkan tenaga pengajar yang banyak pula.

Beliau juga menambahkan bahwa guru-guru yang berada di YP. Al-Khairiyah sudah menjalankan aktivitas kegiatan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan sudah ditetapkan dan kewajiban bagi seluruh guru untuk melaksanakan dan menerapkannya dengan baik dan maksimal.

Namun, Beliau juga menjelaskan bahwa tetap ada kendala dalam pelaksanaan aktivitas guru dalam menerapkan aturan-aturan yang telah ditetapkan, seperti bagi guru-guru yang senior atau dengan usia 50 tahun keatas, lebih kesulitan dalam menerapkan sistem pembelajaran dengan menggunakan teknologi, seperti *in focus*, menggunakan aplikasi *zoom* ketika masa PSBB

diberlakukan, membuat video pembelajaran dengan menggunakan laptop dan lain sebagainya. Tentunya hal tersebut dapat mengganggu kelancaran YP. Al-Khairiyah dalam mencapai maksimal tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan berdasarkan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Jumat, tanggal 5 November 2020 dengan Ibu Syahrina Khadir Nasution selaku orang tua siswa yang mengantarkan anaknya ke YP. Al-Khairiyah Sunggal tentang sumber daya manusia yang berkontribusi dalam menjalankan kebijakan, menyatakan bahwa keahlian para guru dalam mengajar siswa sudah dalam kategori baik. Guru-guru yang mengajar juga guru-guru yang berkompeten di bidangnya dan di jurusannya.

Beliau juga menjelaskan bahwa ia kurang begitu mengetahui berapa jumlah guru yang mengajar di YP. AL-Khairiyah, namun untuk pelaksanaan kegiatan atau proses belajar mengajar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, Beliau menjelaskan bahwa semua guru sudah menjalankan seluruh peraturan dengan baik dan benar.

Kemudian, untuk kendala yang ditemukan guru di YP. Al-Khairiyah dalam proses belajar mengajar atau menjalankan tugasnya adalah mendidik anak-anak yang sulit cepat menangkap pelajaran dengan baik sehingga butuh pengajaran ekstra bagi guru tersebut. Selain itu, anak-anak yang jarang masuk sekolah atau hadir.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Jumat, tanggal 5 November 2020 dengan Ibu Asih Sudarmo Tanjung selaku orang tua siswa yang mengantarkan anaknya ke YP. Al-Khairiyah Sunggal tentang sumber

daya manusia yang berkontribusi dalam menjalankan kebijakan, menjelaskan bahwa guru yang mengajar di YP. Al-Khairiyah adalah guru-guru yang sangat profesional. Hal ini dapat dilihat bahwa guru yang mengajar bukanlah guru-guru baru atau guru magang melainkan guru-guru yang sudah profesional.

Untuk jumlah guru yang mengajar di YP. Al-Khairiyah, Beliau menjelaskan bahwa Beliau kurang mengetahui secara spesifik. Namun menurut sang anak, guru yang mengajar di YP. Al-Khairiyah tidak sedikit. Para guru juga sudah mengajar dengan efektif dan berusaha secara maksimal. Kemudian, untuk masalah kendala dalam proses belajar mengajar, menurut Beliau kendala yang ditemukan adalah guru-guru yang sudah lanjut usia sulit untuk dekat dengan siswa, bahkan terkadang cenderung membuat takut siswa.

4.2.4 Adanya proses pelaksanaan kewajiban dalam menjalankan kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Kamis, tanggal 4 November 2020 dengan ibu Aniyah S.Pd, selaku Ketua Yayasan dan Kepala MDTA di YP. Al-Khairiyah Sunggal tentang proses pelaksanaan kewajiban dalam melaksanakan kebijakan, menyatakan bahwa sampai saat ini keseluruhan anggota keluarga besar YP. Al-Khairiyah telah melaksanakan seluruh aktivitas kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan adanya pengawas yang selalu datang untuk mengawasi dan melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh anggota YP. Al-Khairiyah agar selalu berjalan sesuai dengan kebijakan tersebut.

Beliau juga menambahkan bahwa seluruh staff anggota YP. Al-Khairiyah telah melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan dengan baik dan maksimal, karena YP. Al-Khairiyah juga akan mengenakan sanksi apabila setiap kinerja guru

tidak sesuai dengan kebijakan atau peraturan yang telah ditetapkan, meskipun sanksi tersebut tidak berat.

Beliau juga menjelaskan bahwa segala bentuk peraturan dan yang direncanakan dan dilaksanakan di YP. Al-Khairyah juga sudah berdasarkan dari kebijakan nomor 5 tahun 2014 tersebut. Dan sampai saat ini, seluruh anggota staff dari YP. Al-Khairiyah belum menemukan kendala yang sangat berpengaruh dalam melaksanakan aturan yang telah ditetapkan, baik dari kebijakan nomor 5 tahun 2014 ataupun peraturan yang telah ditetapkan dari YP. Al-Khairiyah sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Kamis, tanggal 4 November 2020 dengan Bapak Muhammad Sirajul Fuad SP, selaku sekretaris Yayasan dan Kepala Sekolah SMP/IT di YP. Al-Khairiyah Sunggal tentang proses pelaksanaan kewajiban dalam menjalankan kebijakan di YP. Al-Khairiyah, menyatakan bahwa sampai saat ini seluruh peraturan, ketetapan dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan YP. Al-Khairiyah telah berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2014.

Secara keseluruhan para staff pengajar yang ada di YP Al-Khairiyah juga telah menjalankan seluruh peraturan dengan baik dan maksimal sesuai dengan yang telah ditetapkan. Yayasan dari YP. Al-Khairiyah juga selalu membuat peraturan dan kebijakan sekolah berdasarkan peraturan daerah nomor 5 tahun 2014 tersebut. Hal ini dikarenakan ini adalah ketetapan dari Kementerian Agama yang bertugas untuk membina seluruh MTs di seluruh Indonesia dengan ketetapan dan peraturan yang disesuaikan.

Sampai saat ini Beliau juga menjelaskan bahwa seluruh staff dan pengajar yang ada di YP. Al-Khairiyah tidak menemukan kendala dalam melaksanakan tujuan sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh YP. Al-Khairiyah berdasarkan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2014. Hal ini disebabkan, seluruh anggota staff dan pengajar di YP. Al-Khairiyah bersama-sama melaksanakan dengan baik peraturan tersebut dengan semaksimal mungkin.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Jumat, tanggal 5 November 2020 dengan Ibu Syahrina Khadir Nasution selaku orang tua siswa yang mengantarkan anaknya ke YP. Al-Khairiyah Sunggal tentang proses pelaksanaan kewajiban dalam menjalankan kebijakan, menyatakan bahwa pelaksanaan peraturan, tugas, pengajaran yang telah dilakukan seluruh guru yang mengajar di YP. Al-Khairiyah sudah berjalan dengan baik dan efektif sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Seluruh guru juga telah melaksanakan semua aturan mulai dari kedisiplinan, proses belajar mengajar dan lain sebagainya dengan baik. Hal ini diketahui dari para guru yang disiplin dan tegas dalam mengajarkan seluruh siswa. Kemudian Beliau juga menambahkan bahwa seluruh guru telah menerapkan peraturan dengan baik dan masih dalam konteks sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Jumat, tanggal 5 November 2020 dengan Ibu Asih Sudarmo Tanjung selaku orang tua siswa yang mengantarkan anaknya ke YP. Al-Khairiyah Sunggal tentang proses pelaksanaan kewajiban dalam menjalankan kebijakan, menyatakan bahwa seluruh staff yang ada di YP. Al-Khairiyah sudah sangat menjalankan kewajiban dengan

baik. Para orang tua juga sangat senang anak-anaknya sudah memiliki pengetahuan agama dengan baik dan mencapai pendidikan yang maksimal baik itu pengetahuan umum, pengetahuan agama dan keterampilan.

YP Al-Khairiyah juga sudah membuat peraturan yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Tidak ada peraturan yang menyalahi dari aturan yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan guru dalam menjalankan dan melaksanakan aturan tersebut. Untuk masalah kendala yang ditemukan, Beliau juga menjelaskan bahwa Beliau tidak mengetahui kendala yang ditemukan. Namun sepengetahuan Beliau, semua berjalan dengan baik.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan uraian dalam penyajian data di atas, maka dalam pembahasan sub bab ini merupakan kajian atau analisis data hasil wawancara dengan para narasumber di YP. Al-Khairiyah sebagaimana telah dijelaskan pada uraian terlebih dahulu, yaitu meliputi analisis berikut :

4.3.1 Adanya tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan kebijakan yang maksimal dan terarah

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Dengan adanya tujuan yang telah ditetapkan, maka implementasi dapat berjalan dan terlaksana dengan baik dan dapat mencapai perubahan-perubahan yang signifikan menuju hasil yang lebih optimal. Dengan demikian, implementasi dapat terjadi jika tujuan dan sasaran kebijakan dapat diwujudkan dengan maksimal dan efektif dari hasil akhir kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan teori tersebut, penulis menilai bahwa tujuan yang telah dicapai oleh YP. Al-Khairiyah dalam rangka pelaksanaan pendidikan Diniyah Takmiliyah sudah berjalan dengan efektif. Hal ini dikarenakan proses pelaksanaan dan pencapaian tujuan dibuat berdasarkan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2014 serta berdasarkan dari Kementerian Agama. YP. Al-Khairiyah berusaha tidak menyalahi aturan atau kebijakan yang telah ditetapkan agar dapat mencapai hasil yang maksimal.

Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan pendapat Bapak Muhammad Sirajul Fuad SP yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 4 November 2020, yang menyatakan bahwa sampai saat ini pendidikan yang dilaksanakan di YP. Al-Khairiyah sudah berjalan sesuai dengan ketentuan Perda nomor 5 tahun 2014. YP. Al-Khairiyah wajib melaksanakan aturan sesuai dengan Perda nomor 5 tahun 2014 karena memang sudah keharusan dari Kementerian Agama.

Menurut Mustopadidjaja (2002:112) Implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Maka dari itu, untuk memaksimalkan tujuan yang telah dibentuk dan ditetapkan, maka perlu adanya sebuah cara atau upaya yang dilakukan agar tujuan

tersebut tetap berjalan dengan baik. Dengan adanya upaya yang dilakukan, maka pencapaian tujuan yang dicapai akan lebih maksimal.

Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan pendapat Ibu Aniyah S.Pd yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 4 November 2020, yang menyatakan bahwa mengenai cara apa saja yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan pendidikan Diniyah Takmiliyah di YP. Al-Khairiyah, Beliau menjelaskan bahwa cara yang mereka lakukan adalah dengan mengirimkan laporan seluruh aktivitas kegiatan yang dilakukan YP. Al-Khairiyah kepada pusat dan melakukan pengawasan secara berkala secara 2 bulan sekali. Hal ini bertujuan agar dapat meninjau dan mengevaluasi sistem yang sudah dilakukan YP. Al-Khairiyah dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan Diniyah Takmiliyah.

Pencatatan laporan aktivitas kegiatan yang dilakukan YP. Al-Khairiyah agar dapat melakukan evaluasi serta mengetahui kekurangan aktivitas kegiatan pendidikan Diniyah Takmiliyah yang sudah dilakukan. Selain itu, adanya pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh pusat atau Kementerian Agama menyebabkan YP. Al-Khairiyah berusaha semaksimal mungkin meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan Diniyah Takmiliyah yang mereka selenggarakan.

Berdasarkan teori Mustopadidjaja, dalam implementasi pencapaian tujuan tetaplah menemukan masalah dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan sebuah aktivitas kegiatan. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan pendapat Bapak Muhammad Sirajul Fuad SP yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 4 November 2020, yang menyatakan bahwa Untuk kendala yang ditemukan dalam melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan, Beliau menyatakan bahwa terdiri dari beberapa faktor, antara lain: dari

segi anggaran dana, seperti BOS yang mengalami penurunan jumlah karena pandemi Covid 19 ini dan pencairan dana BOS yang tidak tepat waktu. Selain itu, adanya kasus seperti siswa yang *broken home* yang disekolahkan disini tentunya dapat sedikit menghambat pencapaian pelaksanaan pendidikan Diniyah Takmilyah yang efektif. Namun hal tersebut tidak mengganggu proses belajar mengajar, karena setiap guru telah mempersiapkan solusi dalam mengatasi hal tersebut.

Berdasarkan pengertian dari teori-teori para ahli dan hasil jawaban dari informan penelitian, maka penulis menyimpulkan bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh YP. Al-Khairiyah dalam melaksanakan kebijakan yang efektif dan terarah sudah berjalan dengan baik. Pencapaian tujuan yang dilakukan YP. Al-Khairiyah diiringi dengan upaya-upaya yang sistematis dan terarah, seperti membuat laporan seluruh aktivitas kegiatan pendidikan Diniyah Takmilyah secara berkala, melakukan evaluasi dan adanya tim pengawas yang dalam kurun waktu 2 bulan sekali melakukan pemantauan ke YP. Al-Khairiyah agar tujuan pelaksanaan Diniyah Takmilyah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan Perda nomor 5 tahun 2014 dan Kementerian Agama.

4.3.2 Adanya tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan

Menurut Horn (2016: 154) implementasi sebagai proses maka proses implementasi merupakan tindakan yang dilakukan, baik individu maupun unit pemerintahan atau suatu yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Dari teori tersebut, dapat diketahui bahwa sebuah implementasi yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya tindakan-tindakan yang dilakukan implementor guna mencapai tujuan yang maksimal dan efektif.

Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan pendapat Bapak Muhammad Sirajul Fuad SP yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 4 November 2020, yang menyatakan bahwa bahwa strategi yang dilakukan guru maupun YP. Al-Khairiyah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah dengan mengadakan proses belajar mengajar yang efektif, seperti membuat setoran wajib hapalan ayat dan surat, secara rutin agar target hapalan yang telah ditetapkan dapat terealisasi oleh siswa dengan baik, memberikan LKS (Lembar Kerja Siswa) untuk pelatihan siswa setelah proses belajar mengajar, kemudian mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang bernuansa islami seperti membaca Al-Quran, saritilawa, melagukan Al-Quran bahkan ekstrakurikuler yang sifatnya umum seperti sepak bola, renang, seni tari dan drama. Hal ini dilakukan untuk memberikan semangat belajar bagi para siswa.

Pendapat tersebut, juga serupa dengan pendapat dari salah satu orang tua murid Ibu Syahrina Khadir Nasution selaku orang tua siswa yang dilakukan pada hari Jumat, 5 November 2020 yang menyatakan bahwa program-program tersebut juga sudah berjalan dengan efektif. Hal ini dibuktikan dengan anak-anak yang belajar di YP. Al-Khairiyah sudah dapat membaca Al Quran dengan lancar, untuk anak SD nya sudah banyak menguasai doa-doa, ayat dan surat pendek dengan baik, melagukan bacaan Al-Quran dengan baik, memiliki sikap dan perilaku yang baik dan lain sebagainya.

Berdasarkan pendapat Horn tersebut, pencapaian tujuan yang telah ditetapkan tentunya tidak terlepas dari batas waktu. Agar sebuah proses implementasi dapat berjalan efektif, maka perlu adanya tenggat waktu yang harus ditetapkan agar menjadi target dalam pelaksanaan implementasi.

Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan pendapat pendapat Ibu Aniyah S.Pd yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 4 November 2020, yang menyatakan bahwa untuk jangka waktu yang telah ditentukan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Beliau menjelaskan bahwa hal ini terjadi secara kondusif. Untuk pencapaian tujuan pembelajaran siswa yang efektif biasanya target yang ditetapkan adalah per semester Jadi dalam jangka waktu per semester (6 bulan), siswa harus mencapai target pendidikan yang telah ditetapkan di RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). Namun jika dikaji secara keseluruhan, maka waktu yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan adalah 1 tahun (sesuai dengan tahun ajaran baru sekolah).

Namun tindakan dan program yang telah dilakukan, dalam proses pencapaiannya tentunya mengalami kendala. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan pendapat pendapat Bapak Muhammad Sirajul Fuad SP yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 4 November 2020, yang menyatakan bahwa kendala yang ditemukan dalam melaksanakan program-program pembelajaran tersebut adalah kurangnya penyediaan sarana buku pelajaran (buku paket) untuk panduan belajar siswa. Hal ini disebabkan tidak adanya dana bantuan dari Kementerian Agama untuk mensupport buku-buku demi menunjang sistem pembelajaran. Dari segi orang tua juga menjadi salah satu penghambat, dikarenakan sebagian besar orang tua siswa merasa keberatan atau tidak mampu

jika buku paket dibeli secara keseluruhan secara pribadi. Maka dari itu, solusi yang dilaksanakan oleh YP. Al-Khairiyah adalah memberikan sistem pembelajaran yang aktif agar lebih banyak ilmu yang dapat digali oleh siswa.

Berdasarkan pengertian dari teori-teori para ahli dan hasil jawaban dari informan penelitian, maka penulis menyimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan dalam mencapai tindakan yang telah ditetapkan YP. Al-Khairiyah adalah membuat program-program pendidikan Diniyah Takmiliah yang efektif bagi siswa, seperti merancang program pelajaran dengan membuat RPP, membuat wajib setoran hapalan ayat dan surat bagi para siswa dalam jangka waktu tertentu, memberikan LKS (Lembar Kerja Siswa) sebagai media pelatihan bagi siswa, menyediakan kegiatan ekstrakurikuler yang bernuansa islami dan umum serta memiliki target pencapaian pembelajaran.

4.3.3 Adanya sumber daya yang berkontribusi dalam menjalankan kebijakan

Menurut Winarno (2005:101) Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang digunakan.

Berbicara mengenai implementasi kebijakan sebagai sebuah aktor, tentu saya membicarakan implementor (pelaksana). Dalam melaksanakan sebuah tujuan, tentunya memerlukan sebuah sumber daya manusia yang berkontribusi dan menjadi implementor dalam membantu mensukseskan pelaksanaan tujuan dan menjalankan kebijakan.

Menurut George C. Edwards III (1984: 9-10), salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik.

Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan pendapat pendapat Bapak Muhammad Sirajul Fuad SP yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 4 November 2020, yang menyatakan bahwa keahlian staff yang harus dipenuhi ketika menjadi tim pengajar di YP. AL-Khairiyah adalah staff yang berkompeten dibidangnya. Beliau menambahkan bahwa YP. AL-Khairiyah adalah sistem pembelajaran dengan menempatkan staff pengajar secara linier, artinya jurusan yang telah diambil seorang guru dalam pendidikan, itulah yang mereka ajarkan disini, seperti jurusan B.Inggris, untuk materi pembelajaran B.Inggris, jurusan pendidikan agama untuk materi pembelajaran agama. Namun poin pentingnya adalah setiap guru juga wajib memiliki pengetahuan agama dengan baik, agar dapat memaksimalkan metode pendidikan bernuansa islami dengan baik.

Pendapat tersebut juga dibenarkan berdasarkan pendapat dari orang tua siswa Ibu Asih Sudarmo yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 05 November

2020 yang menyatakan bahwa guru yang mengajar di YP. Al-Khairiyah adalah guru-guru yang sangat profesional. Hal ini dapat dilihat bahwa guru yang mengajar bukanlah guru-guru baru atau guru magang melainkan guru-guru yang sudah profesional.

Menurut Petters (1982;4-5) kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah, baik pelaksanaannya dilakukan secara langsung ataupun melalui wakil, yang mana aktivitas tersebut mempunyai pengaruh terhadap kehidupan warga Negara.

Berdasarkan teori tersebut, maka sebuah kebijakan dapat berjalan dengan efektif apabila pelaksanaannya juga dilakukan secara efektif dan langsung oleh orang-orang yang terlibat dalam proses tersebut. Maka dari itu, perlu diketahui bagaimana pelaksanaan aktivitas sumber daya yang telah dilakukan berjalan efektif atau tidak.

Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan pendapat orang tua siswa Ibu Syahrina Khadir Nasution yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 05 November 2020 yang menyatakan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan atau proses belajar mengajar yang dilakukan guru sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dan semua guru sudah menjalankan seluruh peraturan dengan baik dan benar.

Namun dalam berkontribusi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tentu saja implementor menemukan kendala dalam pelaksanaannya, baik itu didasari dari faktor eksternal ataupun faktor internal. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan pendapat Bapak Muhammad Sirajul Fuad SP yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 4 November 2020, yang menyatakan bahwa ada kendala dalam pelaksanaan aktivitas guru dalam menerapkan aturan-aturan

yang telah ditetapkan, seperti bagi guru-guru yang senior atau dengan usia 50 tahun keatas, lebih kesulitan dalam menerapkan sistem pembelajaran dengan menggunakan teknologi, seperti *in focus*, menggunakan aplikasi *zoom* ketika masa PSBB diberlakukan, membuat video pembelajaran dengan menggunakan laptop dan lain sebagainya. Tentunya hal tersebut dapat mengganggu kelancaran YP. Al-Khairiyah dalam mencapai maksimal tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan berdasarkan kebijakan.

Berdasarkan pengertian dari teori-teori para ahli dan hasil jawaban dari informan penelitian, maka penulis menyimpulkan bahwa sumber daya yang berkontribusi dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan adalah seluruh staff pengajar di YP. Al-Khairiyah. Guru-guru yang mengajar di YP. Al-Khairiyah adalah guru yang memiliki keahlian di bidang pendidikannya masing-masing dan berkompeten. Hal ini disebabkan sistem metode penerimaan guru di YP. AL-Khairiyah adalah sistem linier. Selain itu, kontribusi guru yang mengajar di YP. Al-Khairiyah juga sudah efektif dan melaksanakan tugas sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Meskipun ada sebagian kecil guru yang sudah mencapai umur 50 tahun yang kesulitan dalam menerapkan sistem pembelajaran dengan menggunakan perkembangan teknologi, namun bantuan dari guru-guru yang lebih muda membuat kontribusi guru dalam pelaksanaan tugas berdasarkan kebijakan tetap menjadi efektif dan maksimal.

4.3.4 Adanya proses pelaksanaan kewajiban dalam melaksanakan kebijakan

Grindle dalam Tachjan (2006 : 14) menyebutkan 3 (tiga) hambatan besar yang setiap kali muncul dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik, yakni : (1)

ketiadaan kerjasama vertikal, antara atasan dengan bawahan; (2) hubungan kerja horizontal yang tidak strategis; (3) masalah penolakan terhadap perubahan yang datang dari publik maupun kalangan birokrasi sendiri. Untuk mengatasi hambatan ini, maka pelaksana kebijakan publik perlu memiliki kemampuan beradaptasi dengan kondisi yang berkembang. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik kadangkala tidak hanya memerlukan rasionalitas, tetapi juga kemampuan pelaksana untuk memahami dan merespon harapan-harapan yang berkembang di masyarakat, di mana kebijakan publik tersebut akan dilaksanakan.

Berdasarkan teori tersebut, maka pelaksanaan kewajiban dalam melaksanakan kebijakan khususnya bagi seluruh implementor yang terlibat harus berjalan efektif serta sesuai dengan ketentuan atau kebijakan yang telah ditetapkan. Karena jika tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan menimbulkan hambatan yang tentunya dapat menghambat pencapaian tujuan.

Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan pendapat Ibu Aniyah S.Pd yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 4 November 2020 yang menyatakan bahwa sampai saat ini keseluruhan anggota keluarga besar YP. Al-Khairiyah telah melaksanakan seluruh aktivitas kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan adanya pengawas yang selalu datang untuk mengawasi dan melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh anggota YP. Al-Khairiyah agar selalu berjalan sesuai dengan kebijakan tersebut.

Pendapat ini juga sesuai dengan pendapat dari orang tua murid yakni Ibu Asih Sudarmo yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 05 November 2020 yang menyatakan bahwa proses pelaksanaan kewajiban dalam menjalankan kebijakan, menyatakan bahwa seluruh staff yang ada di YP. Al-Khairiyah sudah sangat

menjalankan kewajiban dengan baik. Para orang tua juga sangat senang anak-anaknya sudah memiliki pengetahuan agama dengan baik dan mencapai pendidikan yang maksimal baik itu pengetahuan umum, pengetahuan agama dan keterampilan.

Berdasarkan pengertian dari teori-teori para ahli dan hasil jawaban dari informan penelitian, maka penulis menyimpulkan bahwa proses pelaksanaan kewajiban dalam melaksanakan kebijakan yang dilakukan oleh seluruh staff di YP. Al-Khairiyah sudah berjalan dengan efektif. Pelaksanaan tugas dilakukan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena adanya pemantauan dari pengawas bidang pendidikan Diniyah Takmiliah yang dilakukan secara berkala yakni 2 bulan sekali untuk memantau kinerja seluruh staff di YP. Al-Khairiyah. Maka dari itu, setiap guru yang mengajar harus melaksanakan kewajibannya dengan baik agar mendapat penilaian yang baik dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara maksimal dan terarah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan menganalisis data mengenai implementasi Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2014 dalam rangka pelaksanaan pendidikan Diniyah Takmiliah di Kota Medan, maka keterangan dan penjelasan yang penulis peroleh dapat disimpulkan bahwa :

1. Tujuan yang ingin dicapai YP. Al-Khairiyah adalah pelaksanaan pendidikan Diniyah Takmiliah yang efektif dan terarah berdasarkan kebijakan dari Kementerian Agama dan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2014. Pencapaian tujuan yang dilakukan YP. Al-Khairiyah diiringi dengan upaya-upaya yang sistematis dan terarah, seperti membuat laporan seluruh aktivitas kegiatan pendidikan Diniyah Takmiliah secara berkala, melakukan evaluasi serta adanya tim pengawas yang dalam kurun waktu 2 bulan sekali melakukan pemantauan ke YP. Al-Khairiyah.
2. Tindakan yang dilakukan YP. Al-Khairiyah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan kebijakan adalah membuat program-program pendidikan Diniyah Takmiliah yang efektif bagi siswa, seperti merancang program pelajaran dengan membuat RPP, membuat wajib setoran hapalan ayat dan surat bagi para siswa dalam jangka waktu tertentu, memberikan LKS (Lembar Kerja Siswa) sebagai media pelatihan bagi siswa, menyediakan kegiatan ekstrakurikuler yang bernuansa islami dan umum serta memiliki target pencapaian pembelajaran.

3. Sumber daya yang berkontribusi menjalankan kebijakan adalah seluruh staff pengajar di YP. Al-Khairiyah. Guru-guru yang mengajar di YP. Al-Khairiyah adalah guru yang memiliki keahlian di bidang pendidikan dan jurusannya dan berkompeten. Hal ini disebabkan sistem metode penerimaan guru di YP. AL-Khairiyah adalah sistem linier, yakni penerimaan guru sesuai dengan materi pembelajaran. Selain itu, kontribusi guru yang mengajar di YP. Al-Khairiyah juga sudah efektif dan melaksanakan tugas sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
4. Proses pelaksanaan kewajiban dalam melaksanakan kebijakan yang dilakukan oleh seluruh staff di YP. Al-Khairiyah sudah berjalan dengan efektif. Pelaksanaan tugas dilakukan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena adanya pemantauan dari pengawas bidang pendidikan Diniyah Takmiliah yang dilakukan secara berkala untuk memantau kinerja seluruh staff di YP. Al-Khairiyah.

5.2 Saran

Berdasarkan dengan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka penulis memberikan saran-saran dalam implementasi Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2014 dalam rangka pelaksanaan pendidikan Diniyah Takmiliah di Kota Medan, antara lain:

1. Dari segi tujuan yang ingin dicapai, agar kiranya YP. Al-Khairiyah Sunggal menambah target tujuan yang ingin dicapai, seperti pengembangan pembangunan dan fasilitas serta meningkatkan minat siswa untuk mendaftar di YP. AL-Khairiyah Sunggal dan tidak berlandaskan kepada mutu, kualitas pendidikan dan tenaga pengajar saja. Hal ini

dilakukan agar YP. AL-Khairiyah dapat berkembang menjadi sekolah dengan pendidikan Diniyah Takmiliah yang seimbang antara mutu, kualitas, tenaga pengajar dan pembangunan.

2. Dari segi tindakan yang dilakukan, agar kiranya YP. AL-Khairiyah Sunggal menambah program pembelian buku paket untuk para siswa. Hal ini dilakukan agar siswa dapat belajar lebih efektif dan tidak hanya berdasarkan pada LKS saja.
3. Dari segi sumber daya yang berkontribusi, agar kiranya YP. Al-Khairiyah Sunggal memberikan batasan usia untuk guru dalam mengajar, agar tidak ada guru-guru lansia (50 tahun keatas) yang sulit dalam menggunakan kecanggihan teknologi atau memberikan pelatihan untuk guru dalam menggunakan kecanggihan teknologi, seperti penggunaan *in focus*, materi daring dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan agar guru dapat memaksimalkan proses belajar mengajar.
4. Dari segi proses pelaksanaan kewajiban, agar kiranya YP. Al-Khairiyah Sunggal membuat ketetapan aturan secara tertulis bagi guru yang dipajang di ruang guru agar dapat membaca dan mengingat secara lebih spesifik segala bentuk aturan yang telah dibuat oleh YP. A-Khairiyah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agostiono. 2010. *Implementasi Kebijakan Publik Model Teori*, Jakarta : Rajawali Press.
- Amin, Moh. 1987. *Mengajarkan Ilmu Pengetahuan Alam dengan Menggunakan Metode “Discovery” dan “Inquiry”*. Jakarta: Depdikbud-Dirjen Dikti.
- Antonius simanujuntak, Bungaran. 2012. *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan masa depan Indonesia: Berapa pesan lagi tanah dan air Nusantara Malik Raya*. Jakarta: Yayasan pustaka Obor Indonesia,Cet. 111.
- Edward III, Goerge C (edited), 1984. *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England.
- Fattah Jalal, Abdul. 1988. *Asas – asas pendidikan islam*, Bandung: CV. Diponegoro.
- Horn, Van. 2016. *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Irsyadi, Ramadhany.2015.*Peraturan Daerah Kajian Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Yogyakarta: Trussmedia Publishing.
- M.Hadjon,Philipus, *et al.* 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: GadjahMada Universty Press.
- Ngainun, Naim & Ahmad, sauqi. 2010. *Pendidikan multicultural konsep dan aplikasi*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Purwanto. Erwan Agus. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi di Indonesia*. Yogyakarta: JKMP-MAP. Universitas Gadjah Mada.
- Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep Teori Dan Aplikasinya*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Suharjono, Muhammad. 2014. Pembentukan peraturan daerah yang responsive dalam mendukung Otonomi Daerah,*Jurnal Ilmu Hukum*: Vol. 10 No. 19.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung.

Undang-Undang:

Undang-Undang 1945

Undang – undang No. 12 Tahun 2011

PP Tahun 2007 tentang pendidikan Agama dan Keagamaan



Ummul Qidas at Terpenaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax: (061) 6625474
 Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Program Studi IAP
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 15 Juni 2020

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda rangkan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Dhea Amelia Rangkuti
 N P M : 1603 1000 72
 Program Studi : ILMU Administrasi Publik
 Tabungan sks : 137,0 sks, IP Kumulatif 3,39

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2014 dalam rangka pelaksanaan pendidikan di wilayah takmilah di Kota Medan	st
2	Implementasi Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2014 tanpa rokok pada sekolah di Kota Medan	
3	Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 tahun 2011 tentang pagar reklame	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi :

Diteruskan kepada Dekan untuk Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 15 Juni 2020

Ketua,

(.....)

Pemohon,

(Dhea Amelia Rangkuti)

Pembimbing : Anisa Mahardika
 NO 90

*) dilampirkan setelah judul ditandatanganinya oleh Ketua Program Studi.

2



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING
Nomor : 10.090/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2020**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **15 Juni 2020** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **DHEA AMELIA RANGKUTI**
N P M : 1603100072
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2019/2020
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDIDIKAN DINIYAH
TAKMILYAH DI KOTA MEDAN**

Pembimbing : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 15 Juni 2021.

Ditetapkan di Medan,
Medan, 23 Syawal 1441 H
15 Juni 2020 M

Dekan


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 694/KET/IL.3-AU/UMSU-03/F/2020
 Lampiran : -.-
 Hal : *Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa*

Medan, 17 Rabiul Awwal 1442 H
 03 November 2020 M

Kepada Yth : **Kepala Yayasan Pendidikan Al-Khairiyah Sunggal**
 di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
 Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **DHEA AMELIA RANGKUTI**
 N P M : 1603100072
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : IX (Sembilan) / Tahun Akademik 2020/2021
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIAH DI KOTA MEDAN**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
 Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan



Dr. ARIEFIN SALEH, S.Sos., MSP.



MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
AL-KHAIRIYAH SUNGGAL
 JL. BINJAI KM.10,5 PAYA GELI SUNGGAL GG. PENDIDIKAN NO.14
 TELP. (061) 8459536 KAB. DELI SERDANG

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No. 103/MTs AL KH/SK/XI/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala MTs Al Khairiyah Sunggal Kabupaten Deli Serdang Menerangkan Bahwa:

Nama : **DHEA AMELIA RANGKUTI**

NIM : 1603100072

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Telah mengadakan penelitian pada

Hari/Tanggal : Kamis, 4 November 2020

Tempat : MTs Al Khairiyah Sunggal

Judul : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIAH DI KOTA MEDAN**

Demikian Surat Keterangan ini di buat dengan sebenarnya, agar dapat di gunakan sebagai mana fungsinya

Sunggal, 7 November 2020

Kepala Madrasah

WAJAR, S.Pd



3



Unggul, Cerdas & Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 04 September 2020

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Dhea Amelia Rangruti
N P M : 1603100072
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 640.../SK/II.3/UMSU-03/F/20...20 tanggal 29 Oktober 2020 dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Dalam Rangka Pelaksanaan Pendidikan Dimiyah Takmiliah Di Kota Medan

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap -3)
8. Semua berkas dimasukan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Menyetujui :

Pembimbing

(.....)

Pemohon,

Dhea Amelia Rangruti

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 640/KEP/II.3-AU/UMSU-03/F/2020

Program studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Kamis, 22 Oktober 2020
W a k t u : 09.00 WIB s/d. Selesai
Tempat : Ruang Kuliah Gedung C UMSU
Pemimpin Seminar : **Naili Khairiah, S.IP, M.Pd**

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggung	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
1	JIHAN HANIPA RITONGA	1603100112	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2014 DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PEMELIHARAAN DRAINASE DI DELI SERDANG
2	PUTRI NUR INDA SARI SUJABAT	1603100117	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 11 TAHUN 2020 DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 PADA PASAR TRADISIONAL DI KOTA MEDAN
3	TIA LORENA BR SINUHAJI	1603100126	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.01.07/MENKES/382/2020 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN DI KECAMATAN GALANG KABUPATEN DELI SERDANG
4	DHEA AMELIA RANGKUTI	1603100072	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIAH DI KOTA MEDAN
5	MANDA AMALIA HARAHAP	1603100029	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si	IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NOMOR 32 TAHUN 2009 DALAM RANGKA PENGELOLAAN LIMBAH CAIR DI KABUPATEN DELI SERDANG

Medan, 02 Rabiul Awwal 1442 H

19 Oktober 2020 M



Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.

U



Elku menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan: Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : http://www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Dhea Amelia Pangkoti
 N P M : 1603 1000 72
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Dalam Rangka Pelaksanaan Pendidikan Dimiyah Ta'limiyah Di Kota Medan

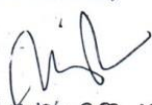
No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	16/04-2020	Acc judul proposal skripsi	A.
2.	8/6-2020	Revisi proposal	A.
3.	16/7-20	Revisi revider proposal skripsi	A.
4.	4/9-20	acc proposal	A.
5.	22/10-20	seminar proposal skripsi	A.
6.	25/10-20	revisian hasil seminar proposal skripsi & Draft wawancara	A.
7.	3/11-20	revisi draft wawancara & Acc Draft wawancara.	A.
8.	8/11-20	penelitian di yayasan pendidikan Al-Khairiyah sunggal	A.
9.	24/12-20	revisi skripsi	A.
10.	3/2-21	revisi skripsi revider	A.
11.	10/2-21	acc skripsi	A.

Medan, 10 Februari 2021

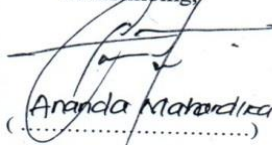
Dekan,


 Dr. Arifin Saleh S.Sos., Msp

Ketua Jurusan,


 Naluz Khairiah S.Pd., M.Pd.

Pembimbing,


 Ananda Matondika



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchta: Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

SK-6

PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

Kepada Yth.
 Bapak Dekan FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 05 Maret 2021

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama lengkap : Dhea Amelia Rangcuti *
 N P M : 1603 1000 72
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Alamat rumah : Jl. Sekeloa No. 15/3A SEREP
 Telp : 0812 62880484

dengan ini mengajukan permohonan mengikuti Ujian Skripsi. Bersama ini Saya lampirkan persyaratan:

1. Transkrip Nilai Kumulatif dari Dekan, rangkap - 2;
2. Tanda Bukti Lunas SPP tahap berjalan, rangkap - 2;
3. Tanda Bukti Lunas Biaya Ujian Skripsi, rangkap - 2;
4. Foto Copy Ijazah Terakhir Dilegalisir, rangkap - 3;
5. Konvensi Nilai (bagi Mahasiswa pindahan), rangkap - 2;
6. Surat Keterangan Bebas Pinjaman Buku dari Perpustakaan UMSU, rangkap - 2;
7. Foto Copy Cover Skripsi, rangkap - 2;
8. Foto Copy Surat Penetapan Pembimbing (SK-2), rangkap - 2;
9. Foto Copy Kartu Hasil Studi, rangkap - 2; dan Melampirkan yang Aslinya.
10. Foto Copy Sertifikat Lulus Ujian Kompri, rangkap - 2; dan Melampirkan yang Aslinya.
11. Permohonan Ujian Skripsi, rangkap - 2;
12. Pas Photo Terbaru Hitam Putih Ukuran 3 x 4 cm = 5 lembar dan 4 x 6 = 8 lembar
13. Skripsi yang telah Disahkan lengkap diperbanyak = 3 eksemplar dan dijilid (Pembimbing - 1).
14. Terlampir Photocopy KTP ukuran A4 sebanyak = 2 lembar

Demikianlah permohonan Saya, untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak Saya ucapkan terima kasih, Wassalam.

Permohon,

 (Dhea Amelia Rangcuti)

Disetujui oleh ;
 Medan, 05 Maret 2021

Medan, 05 Maret 2021

Dekan,

 (Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos.,MSP)

a.n.Rektor,
 Wakil Rektor - I

 (Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH.,M.Hum)



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Hila menjawab surat ini agar disetujui
nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

SK-7

SURAT PERNYATAAN

Bismillahirrohmanirrohien.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara :

Nama lengkap : Dhea Amelia Rangcuti
 Tempat, tgl. lahir : Medan, 29 Desember 1987
 Agama : Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Budha*
 Status Perkawinan : Kawin/Belum Kawin/Duda/Janda*
 N P M : 1603 100 72
 Alamat Rumah : Jl. Sikambang No 15/3A Sekip
 Pekerjaan/Instansi : CAPA AC mobil (Administrasi / Kasir) Telp/HP. 0812 6288 0484
 Alamat Kantor : Jl. Merak No 46 Medan, Sikambang B
 Telp/HP. 0813 7020 7741

melalui surat permohonan tertanggal telah mengajukan permohonan menempuh Ujian Skripsi. Untuk ujian skripsi yang akan saya tempuh, menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Bahwa saya siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dari Penguji.
3. Bahwa saya bersedia menerima keputusan yang ditetapkan oleh Panitia Penguji Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun juga.
4. Saya menyadari bahwa keputusan Panitia Penguji ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran tanpa paksaan atau tekanan dalam bentuk apa pun dan dari siapa pun, untuk dipergunakan bilamana dipandang perlu. Semoga Allah SWT. meridhoi saya. Amien.-

Saya yang menyatakan;



Dhea Amelia Rangcuti

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Sk-10



UNDANGAN PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 432/UND/III.3-AU/UMSU-09/F/2021



Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Selasa, 30 Maret 2021
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PEMIMBING	
1	MANDA AMALIA HARAHAP	1603100029	IDA MARTINELLY, SH., MM	SYAFRUDDIN, S.Soc., MH	DEDI AMRIZAL, S.Soc., M.SI	IMPLEMENTASI PERATURAN PERJUDANG-UNDANGAN NOMOR 32 TAHUN 2009 DALAM RANGKA PENGELOLAAN LIMBAH CAIR DI KABUPATEN DELI SERDANG
2	NURUL PERMATA DEWI	1603100115	DEDI AMRIZAL, S.Soc., M.SI	ANANDA MAHARDIKA, S.Soc., M.SP	IDA MARTINELLY, SH., MM	MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK INMAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN DALAM PENGELOLAAN PROGRAM KARTU PRAKERJA
3	MASRAYANI SIREGAR	1603100123	IDA MARTINELLY, SH., MM	ANANDA MAHARDIKA, S.Soc., M.SP	SYAFRUDDIN, S.Soc., M.SI	FUNGSI KEPENJAJARAN TRANSFORMASIONAL DALAM MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MEDAN
4	RAWIE SUMANDA	1603100087	MAIL KHARIAH, S.IP, MPd	ANANDA MAHARDIKA, S.Soc., M.SP	IDA MARTINELLY, SH., MM	IMPLEMENTASI PERATURAN KEJENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NO.13 TAHUN 2008 DALAM RANGKA PELAKSANAAN AKREDITASI SEKOLAH TAMAAN YANG-KANK DI KECAMATAN MEDAN MARELAN
5	DHEA AMELIA RANGKUTI	1603100072	MAIL KHARIAH, S.IP, MPd	SYAFRUDDIN, S.Soc., MH	ANANDA MAHARDIKA, S.Soc., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIYAH DI KOTA MEDAN

Notulis Sidang :

Medan, 12 Syaban 1442 H
26 Maret 2021 M

1. Ditetapkan oleh :



Dr. ARIFIN SALEH, S.Soc., MSP.

Ketua



Panitia Ujian

Sekretaris

Dr. ZULFAHMI, M.I.Kom